



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT



LAPORAN TAHUNAN

DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

2025





KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta wujud penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, dan akuntabel. Laporan ini menyajikan informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selama Tahun Anggaran 2025.

Sebagai unit organisasi yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan transportasi laut nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengelolaan kepelabuhanan, perlindungan lingkungan maritim, serta penguatan konektivitas transportasi laut guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 diarahkan untuk mendukung terciptanya sistem transportasi laut yang andal, efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Penyusunan laporan ini didasarkan pada realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), serta Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sepanjang tahun 2025. Di dalamnya disajikan gambaran pelaksanaan kegiatan, capaian kinerja, dan realisasi anggaran sebagai bagian dari upaya mendukung penyelenggaraan transportasi laut yang aman, selamat, andal, dan berkelanjutan.

Laporan Tahunan Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya, sekaligus mendorong peningkatan kualitas kinerja organisasi, akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta pelayanan kepada masyarakat. Dengan semangat perbaikan berkelanjutan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan terus berupaya meningkatkan kontribusinya dalam mendukung terwujudnya sistem transportasi laut nasional yang aman, selamat, tertib, lancar, dan berkelanjutan.

Jakarta,

2026

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

MUHAMMAD MASYHUD



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	V
PROFIL PIMPINAN	1
BAB I PROFIL DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT.....	4
A. Tugas Pokok dan Fungsi	4
B. Visi dan Misi	4
C. Organisasi dan Tata Kelola	5
D. Profil Sumber Daya Manusia (SDM)	6
BAB II KILAS KINERJA 2025.....	7
I. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut	7
II. Direktorat Kepelabuhanan	15
III. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan	22
IV. Direktorat Kenavigasian.....	24
V. Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran	33
VI. Bagian Perencanaan	38
VII. Bagian Keuangan	45
VIII. Bagian Sumber Daya Manusia	48
IX. Bagian Hukum dan Kerja Sama	51
X. Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat	64
BAB III PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA	68
BAB IV KEGIATAN STRATEGIS/PERISTIWA PENTING/PROGRAM UNGGULAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT.....	73
BAB V KETERLIBATAN STAKEHOLDER (CSR)	93



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 ASN Menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin Tahun 2025.....	6
Tabel 1.2 Jumlah SDM ASN Menurut Golongan Kepegawaian Tahun 2025	6
Tabel 2.1 SDM Teknis Bidang Perkapalan dan Kepelautan	23
Tabel 2.2 Kapal Berbendera Indonesia	23
Tabel 2.3 Pelaut Indonesia	23
Tabel 2.4 Uji Petik Angkutan Laut	24
Tabel 2.5 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Kenavigasian 2025-2029	24
Tabel 2.6 Laporan Keuangan Direktorat Kenavigasian	28
Tabel 2.7 Umur Kapal Negara Kenavigasian	31
Tabel 2.8 Kondisi Kapal Negara Kenavigasian	31
Tabel 2.9 Kegiatan Sinkronisasi Teknis Penetapan Alur Pelayaran	32
Tabel 2.10 Jenis Sertifikat Standar di Bidang Telekomunikasi Pelayaran	33
Tabel 2.11 Capaian Kinerja	34
Tabel. 2.12 Capaian Indikator Prgram (IKP) 2025	35
Tabel. 2.13 Capaian Kinerja Operasional KPLP Tahun 2025	35
Tabel 2.14 Realisasi Anggaran Direktorat KPLP	36
Tabel 2.15 Pagu dan Realisasi Per Kegiatan	38
Tabel 2.16 Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Penyelesaian Perkara	52
Tabel 2.17 Penyusunan Naskah Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama	53
Tabel 2.18 Inventarisasi Proses Pengurusan Hak Pengelolaan Atas Perjanjian Konsesi	57
Tabel 3.1 Data Disparitas pada SIASN BKN	68
Tabel 3.2 Capaian IP ASN DJPL	69
Tabel 3.3 Ujian Dinas Tingkat I	69
Tabel 3.4 Pemberian Piagam Penghargaan Satya Lencana Karya Satya Tahun 2025	69
Tabel 3.5 Rekapitulasi Kasus/Pelanggaran Disiplin Tahun 2025.....	70
Tabel 3.6 Rekapitulasi Keputusan Hukuman Disiplin Tahun 2025.....	70
Tabel 3.7 Rekapitulasi Keputusan Pemberhentian Sementara Tahun 2025.....	71
Tabel 3.8 Rekapitulasi Keputusan Izin/Keterangan Melakukan Perceraian Tahun 2025	71
Tabel 3.9 Pemetaan Potensi dan Kompetensi/Assessment	72



Tabel 4.1 Daftar Lokasi Pelaksanaan Uji Petik Angkutan Lebaran 2025	78
Tabel 4.2 Daftar Lokasi Pelaksanaan Uji Petik Transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan Tahun 2025.....	78
Tabel 4.3 Daftar Lokasi Pelaksanaan Uji Petik Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026	78
Tabel 4.4 Daftar Pembangunan Menara Suar Dan Rambu Suar	80
Tabel 4.5 Pembangunan Kapal Negara Patroli Rigid Hull Aluminium Boat (RHAB)	83
Tabel 4.6 Penyelenggaraan Sidang/ Pertemuan Multilateral, Regional dan Bilateral pada Tahun 2025	85
Tabel 4.7 Pertemuan Indonesia- Brunei Darussalam-Malaysia – <i>Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)</i>	86
Tabel 4.8 Sidang/Pertemuan pada <i>International Maritime Organization</i> (IMO).....	87
Tabel 4.9 Kegiatan Dalam Rangka Pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan IMO Kategori “C” Periode 2026-2027.....	88



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	5
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Perhubungan Laut	5
Gambar 2.1 KM. Sabuk Nusantara 98 sandar di Pelabuhan Karas Fak Fak	7
Gambar 2.2 KM. Sabuk Nusantara 89	8
Gambar 2.3 KM. Kendhaga Nusantara 5	9
Gambar 2.4 KM. Camara Nusantara 1	10
Gambar 2.5 KM. Ghanda Nusantara 18 Dipangkalan Manado	10
Gambar 2.6 Posko Angkutan Nataru Tahun 2024/2025	14
Gambar 2.7 Alat Ukur Keandalan Telekomunikasi Pelayaran	29
Gambar 2.8 Sarana Penunjang Kegiatan MSI	29
Gambar 2.9 Jumlah Kapal Negara dan Lokasi Pemangkalan	30
Gambar 4.1 Pelabuhan Anggrek Provinsi Gorontalo	75
Gambar 4.2 Pelabuhan Patimban	76
Gambar 4.3 Pembangunan Kapal Negara Patroli Rigid Hull Aluminium Boat.....	84
Gambar 4.4 <i>10th DGST-MPA Officers Dialogue dan 19th Meeting of DGST-MPA Training MoU</i>	86
Gambar 4.5 <i>Council – 134th session</i> (London, 7 – 11 Juli 2025).....	88
Gambar 4.6 <i>Council – 135th session London</i> (London, 19 – 21 November 2025).....	88
Gambar 4.7 Resepsi Diplomatik RI di London (Dilaksanakan di sela Sidang IMO Council ke-134) London, 10 Juli 2025.....	88
Gambar 4.8 Resepsi Diplomatik RI di London	89
Gambar 4.9 Resepsi Diplomatik RI di Jakarta	89



PROFIL PIMPINAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



Muhammad Masyhud, S.T., M.T.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Lahir pada tanggal 22 Juni 1970 di Jakarta. Merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki pengalaman panjang di bidang transportasi laut, kepelabuhanan dan kenavigasian. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Sipil di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan kembali pendidikannya dan meraih gelar S2 dengan jurusan Magister Transportasi di Institut Teknologi Bandung. Memulai tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 1998 dan mengawali karir sebagai Kepala Seksi Pedoman dan Rancangan Teknis Faspel pada tahun 2010. Sebelum menjabat sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Laut, beliau merupakan Direktur Kepelabuhanan periode 2023-2025.



Lollan Andy Sutomo Panjaitan, S.T., M.T.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Lahir pada tanggal 25 Januari 1971 di Jakarta. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana pada program studi Teknik Sipil di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikannya dan berhasil meraih gelar Magister Teknik pada Universitas Institut Teknologi Bandung. Selama berkarier di Kementerian Perhubungan, beliau telah mengemban berbagai jabatan strategis, termasuk sebagai Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri pada Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri. Sejak tahun 2023, beliau dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut beliau menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Perhubungan Laut.



Dr. Capt. Budi Mantoro, M.Si., M.Mar.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Merupakan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut yang dilahirkan di Magelang, Jawa Tengah pada tanggal 15 September 1972. Beliau pernah menjadi *instruktur System and Operationship Static Stability (Floating) Simulator* tahun 2013, lulus pelatihan *Marine Investigation Course* tahun 2014, dan IMO MODEL COURSE 3.12 tahun 2016. Mulai mengemban tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2002. Sebelum menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, beliau menjabat sebagai Direktur Kenavigasian.



Dr. Muhammad Anto Julianto, S.E., M.Si

Direktur Kepelabuhanan

Lahir di di Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal 25 Juli 1968. Beliau menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas Indonesia Jurusan Ekonomi Akuntansi, S2 di Universitas Gadjah Mada Jurusan Magister Administrasi Publik dan Pendidikan Terakhir S3 Jurusan Ekonomi dan Bisnis di Universitas Trisakti pada tahun 2025. Mulai mengemban tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 1990 dan mengawali karir sebagai Inspektur I pada tahun 2016. Sebelum menjabat sebagai Direktur Kepelabuhanan, beliau menjabat sebagai Inspektur I periode 04 Maret 2024 s.d 09 Mei 2025.



Ir. SAMSUDDIN, MT, N.Mar.E, IPM, ASEAN Eng.
Direktur Perkapalan dan Kepelautan

Merupakan Direktur Perkapalan dan Kepelautan yang lahir di Pangkep, Sulawesi Selatan, pada tanggal 17 Januari 1972. Beliau menyelesaikan pendidikan terakhir S2 Jurusan Teknik Perkapalan di Universitas Hasanuddin (UNHAS) pada tahun 2006 dan menyelesaikan Profesi Insinyur di UMI Makassar pada tahun 2024. Mulai mengemban tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2002 dan mengawali karier manajerial sebagai Kepala Subbagian Keuangan PIP Makassar.



Ir. Hernadi Tri Cahyanto, MT.
Direktur Kenavigasian

Lahir di Semarang, Jawa Tengah, 07 Oktober 1968. Pernah menempuh pendidikan Sarjana di Institut Teknologi Bandung (1993) dan Magister di Institut Teknologi Bandung (2022). Dalam masa karirnya, beliau pernah menjabat diantaranya sebagai Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Palembang (2024), Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Belawan, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar (2023-2024) dan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar (2022-2023)



Dr. Triono, S.Pel., M.M., M.H.
Plt. Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran

Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1973, beliau menempuh pendidikan Diploma III dan S1 Pelayaran, kemudian melanjutkan pendidikan Magister Manajemen serta Magister Hukum, dan meraih gelar Doktor di bidang Administrasi Publik pada Universitas Negeri Makassar. Mengawali karier sebagai Aparatur Sipil Negara, beliau memiliki pengalaman panjang dalam bidang keselamatan dan keamanan pelayaran. Sebelum menjadi Plt. Direktur KPLP beliau menjabat sebagai Kasubdit Tertib Berlayar Dit. KPLP.



BAB I PROFIL DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayaran. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan di lingkungan maritim;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan di lingkungan maritim;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan di lingkungan maritim;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan di lingkungan maritim;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan di lingkungan maritim;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

B. Visi dan Misi

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada visi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu ***"Terwujudnya penyelenggaraan transportasi laut nasional yang efektif, efisien, dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah sebagai infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara."***

Untuk mewujudkan visi organisasi, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan misi sebagai berikut:

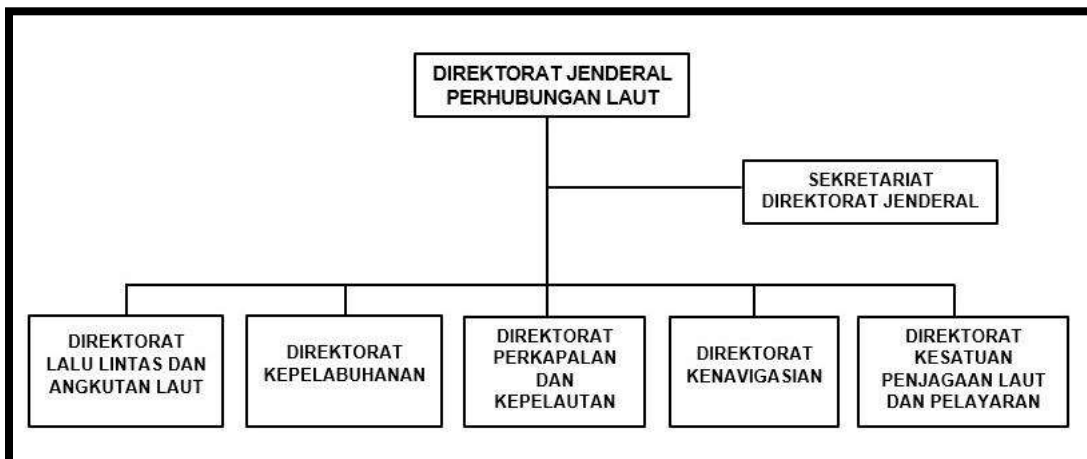
1. Menyelenggarakan kegiatan angkutan di perairan dalam rangka memperlancar arus perpindahan orang/dan atau barang melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan berdaya guna;
2. Menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan yang andal dan berkemampuan



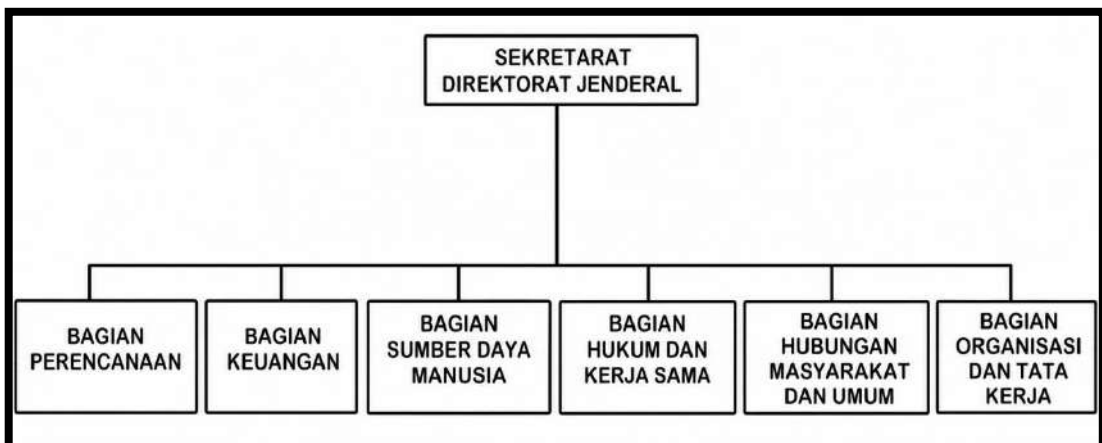
- tinggi, menjamin efisiensi dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan nusantara;
3. Menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan nusantara;
 4. Menyelenggarakan keselamatan dan keamanan angkutan perairan dan pelabuhan;
 5. Menyelenggarakan perlindungan lingkungan maritim di perairan nusantara;
 6. Melaksanakan konsolidasi peran masyarakat, dunia usaha dan pemerintah melalui restrukturisasi dan reformasi peraturan.

C. Organisasi dan Tata Kelola

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan unit eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan laut. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut didukung oleh 6 (enam) unit satuan kerja di tingkat pusat yang digambarkan dalam struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Perhubungan Laut



D. Profil Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Jumlah SDM Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tahun 2025 sebanyak 21.621 yang tersebar di 303 unit kerja yang terdiri dari unit kerja Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh wilayah Indonesia.

Unit kerja pusat meliputi Sekretariat Direktorat Jenderal serta 5 (lima) Direktorat Teknis yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan laut, kepelabuhanan, perkapalan dan kepelautan, kenavigasian, serta penjagaan laut dan pantai.

Sementara itu, Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri atas berbagai kantor operasional yang berperan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di daerah, antara lain Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKPP), Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP), Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP), Distrik Navigasi, serta Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP). Sebaran sumber daya manusia tersebut menjadi modal utama dalam memastikan terselenggaranya pelayanan transportasi laut yang selamat, aman, tertib, lancar, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Tabel 1.1 ASN Menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin Tahun 2025

No.	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai		
		Laki-Laki	Perempuan	Lk + Pr
1	PNS	11.028	2.544	13.572
2	CPNS	1.178	385	1.563
3	PPPK Penuh Waktu	3.600	1.259	4.859
4	PPPK Paruh Waktu	1.367	260	1.627
Jumlah		17.173	4.448	21.621

Tabel 1.2 Jumlah SDM ASN Menurut Golongan Kepegawaian Tahun 2025

No.	Golongan	Jumlah Pegawai
1	Golongan IV	680
2	Golongan III	10929
3	Golongan II	3519
4	Golongan I	4
5	I	34
6	III	140
7	V	2932
8	VII	512
9	IX	1239
10	X	5
11	PPPK Paruh Waktu	1627
Jumlah		21.621



BAB II KILAS KINERJA 2025

I. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

A. Program Kegiatan

Anggaran program kegiatan melalui belanja pemerintah yang telah dilaksanakan telah mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Tahun Anggaran 2025 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Tahun Anggaran 2025 yang digunakan untuk mendanai kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Laut Keperintisan

Tujuan utama program ini adalah sebagai konektivitas antar wilayah Indonesia khususnya ke daerah yang belum berkembang ekonominya. Dengan begitu angka distribusi logistik maupun perpindahan masyarakat semakin lancar sehingga angka disparitas semakin turun. Melalui Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut sebagai salah satu unit kerja di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kegiatan angkutan laut perintis untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Indonesia di pulau-pulau yang belum dilayari oleh kapal-kapal niaga nasional serta daerah yang masih tertinggal dan atau wilayah terpencil, daerah perbatasan dan terdepan/terluar dengan nilai kontrak Rp1.473.055.630.159 dengan realisasi Rp1.471.478.712.995 (99.89%) terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan layanan angkutan laut perintis mekanisme penugasan 30 trayek dengan nilai kontrak Rp429.143.168.000,00.- dengan realiasi anggaran sebesar Rp429.143.168.000,00.- (100%) dan realisasi 776 voyage.



Gambar 2.1 KM. Sabuk Nusantara 98 sandar di Pelabuhan Karas Fak Fak



- b. Penyelenggaraan layanan angkutan laut perintis mekanisme pelelangan swasta 75 trayek dengan nilai kontrak Rp1.023.875.574.669.- dengan realiasi anggaran sebesar Rp782.420.401.984.- (76%) dan realisasi 1.596 voyage.



Gambar 2.2 KM. Sabuk Nusantara 89

2. Penyelenggaraan Angkutan Barang Tol Laut

Kegiatan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut (Tol Laut) dilaksanakan sebagai implementasi amanat Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan, dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan wilayah melalui konektivitas transportasi dan khususnya untuk menekan disparitas harga kebutuhan pokok di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.

Konsep Tol Laut adalah tersedianya kapal dengan trayek tetap dan teratur serta pelayanan yang terjadwal, sehingga diharapkan dengan adanya Tol Laut akan berdampak pada terjaminnya ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting serta mengurangi disparitas harga di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.

Pada tahun 2025 terselenggara 39 trayek Tol Laut, dengan 20 trayek melalui mekanisme penugasan kepada BUMN yaitu PT PELNI (Persero), PT Djakarta Lloyd (Persero) dan PT. ASDP (Persero), serta 19 trayek melalui mekanisme lelang /swasta. Adapun total realisasi voyage pada tahun 2025 adalah sebanyak 756 voyage dan realisasi muatan sebanyak 3.658 Teus dan 2.224,74.41 dengan nilai pagu 647.032.765.000, terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (subsidi) angkutan barang dilaut dengan mekanisme penugasan sebanyak 21 trayek dengan pagu Rp. 296.748.189.000.- dengan realiasi anggaran sebesar Rp.



296.748.189.000.- (100%) dan realisasi 373 voyage.

- b. Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (subsidi) angkutan barang dilaut dengan mekanisme swasta sebanyak 16 trayek dengan pagu Rp. 350.284.576.000.- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 350.284.576.000.- (100%) dan realisasi 355 voyage.



Gambar 2.3 KM. Kendhaga Nusantara 5

3. Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak

Subsidi Angkutan Ternak. Distribusi hewan ternak antar pulau di Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam penyediaan sarana angkut, khususnya kapal khusus pengangkut hewan ternak. Mengatasi kondisi tersebut, sejak tahun 2015 pemerintah mengambil peran dengan menjalankan program pelayanan angkutan laut ternak, menggunakan kapal khusus ternak KM Camara Nusantara. Saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memiliki 6 unit kapal khusus ternak yang dibangun dengan bentuk dan desain khusus untuk sarana pengangkutan Ternak dengan memperhatikan kaidah kesejahteraan hewan (*animal welfare*) dan dilengkapi dengan tenaga medis (dokter dan mantri hewan) sehingga kondisi kesehatan dan kesejahteraan ternak selama pelayaran dapat terjaga.

Program pengoperasian kapal khusus angkutan ternak yang telah disediakan, merupakan salah satu implementasi dari program Tol Laut dalam mendukung pemenuhan ternak dari daerah sentra produksi ternak ke wilayah konsumen. Pada tahun 2025 terdapat 6 trayek, dengan 2 trayek dengan mekanisme penugasan kepada BUMN yaitu PT PELNI (Persero) dan PT. ASDP (Persero). Serta 4 trayek mekanisme lelang /swasta. dengan total realisasi 100 voyage dan realisasi muatan 49.845 ekor dengan nilai ternak Rp79,072,870,893.- dengan realisasi Rp79.072.870.893 (100%) terdiri dari.

- a. Pelayanan angkutan kapal ternak dengan mekanisme penugasan sebanyak 2 trayek dengan nilai pagu Rp26,165,959,400.- dengan realisasi anggaran sebesar Rp26,165,959,400.- (100%)



- b. Pelayanan angkutan kapal ternak dengan mekanisme swasta sebanyak 4 trayek dengan nilai pagu Rp52,906,911,493.- dengan realiasi anggaran sebesar Rp52,906,911,493.- (100%)



Gambar 2.4 KM. Camara Nusantara 1

4. Kapal Rede

Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Perairan Pelabuhan Dengan Menggunakan Kapal Milik Negara (Kapal Rede) Tahun Anggaran 2025 melalui mekanisme penugasan yaitu PT PELNI (Persero) dengan nilai pagu sebesar Rp52.410.233.000 dengan realiasi anggaran sebesar Rp52.410.233.000.- (100%) telah dilakukan penyerapan. Tahun Anggaran 2025 terdapat 16 trayek dan target 584 trip dan realisasi 589 trip dengan muatan penumpang 48.003 orang.



Gambar 2.5 KM. Ghanda Nusantara 18 Dipangkalan Manado

Dalam rangka mengoptimalisasikan layanan angkutan laut penumpang pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas yang lengkap, diperlukan pelayanan angkutan perairan pelabuhan sebagai penghubung dari kapal



utama ke pelabuhan.

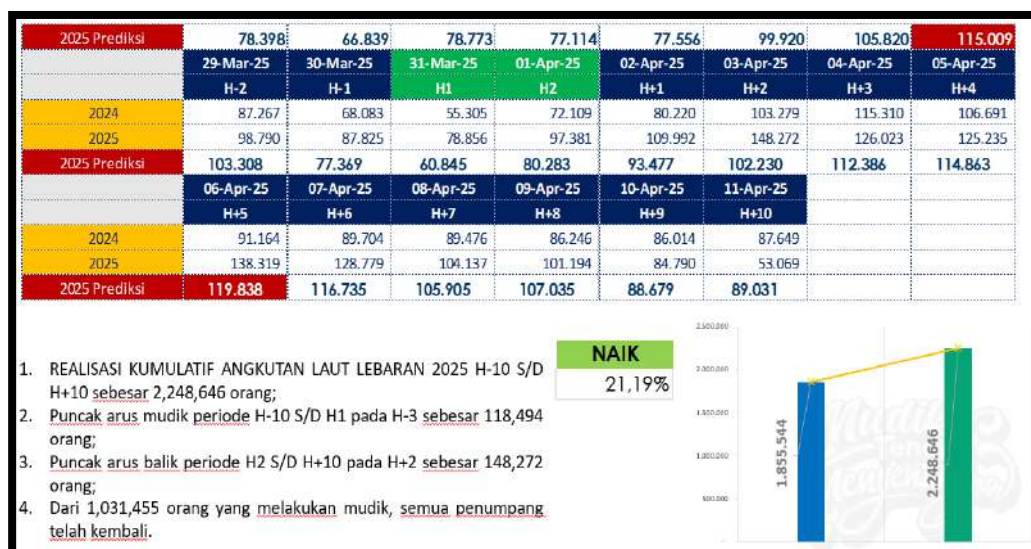
Kapal rede merupakan satu kesatuan dengan penyelenggaraan angkutan laut perintis maupun angkutan laut PSO dimana kehadiran kapal rede diperuntukkan sebagai feeder atau penghubung menuju pelabuhan-pelabuhan atau tempat-tempat yang tidak dapat disinggahi oleh kapal utama dikarenakan fasilitas pelabuhan yang belum lengkap, serta kedalaman alur dan kolam pelabuhan yang dangkal.

5. Posko Angkutan Lebaran 1446 H /2025

Kegiatan Posko dilaksanakan selama 22 hari mulai dari 21 Maret 2025 (H-10) sampai dengan 11 April 2025 (H+10), pada 264 titik pantau, dengan Total armada yang dioperasikan sebanyak 703 kapal, dispensasi kapasitas penumpang diberikan pada 42 kapal penumpang dengan memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan, dan Realisasi tiket gratis sampai dengan 12 April 2025 sebesar 90,64%.

Realisasi Kumulatif Angkutan Laut Lebaran 2025 H-10 S/D H+10 sebesar 2,248,646 orang, Puncak arus mudik periode H-10 S/D H1 pada H-3 sebesar 118,494 orang, Puncak arus balik periode H2 S/D H+10 pada H+2 sebesar 148,272 orang, dari 1,031,455 orang yang melakukan mudik, seluruhnya sudah kembali.

Realisasi Kumulatif Angkutan Penyeberangan Merak – Bakauheni pada Angkutan Lebaran 2025 H-10 S/D H+10 sebesar 2,772,669 orang dan 657,510 kendaraan





2025	TOTAL			Mudik ke Sumatera	Balik dari Sumatera	% Balik	Mudik ke Jawa	Balik dari Jawa	% Balik
	Mudik	Balik	% Balik						
Roda 2	93,315	113,915	122.08%	85,688	91,044	106.25%	7,627	22,871	299.87%
Roda 4	156,900	189,274	120.63%	110,187	121,976	110.70%	46,713	67,298	144.07%
Bus	12,283	11,482	93.48%	6,301	5,780	91.73%	5,982	5,702	95.32%
Truck	44,753	35,588	79.52%	23,272	19,083	82.00%	21,481	16,505	76.84%
Roda 4 atau lebih	213,936	236,344	110.47%	139,760	146,839	105.07%	74,176	89,505	120.67%
Penumpang	1,301,537	1,471,132	113.03%	887,106	942,346	106.23%	414,431	528,786	127.59%

Seluruh penumpang sudah kembali, sebagian besar kendaraan sudah kembali.

Pada rentang waktu 4 jam an, periode kenaikan tertinggi arus mudik terjadi pada :

- Merak :
 - Roda 4 → pada 28 Maret (04:00–08:00)
 - Penumpang → pada 29 Maret (08:00–12:00)
- Ciwardan : pada 29 Maret (04:00–08:00)

Arus Balik

Bakauheni :

- Roda 4 → 6 April (20:00–24:00)
- Penumpang → 6 April (16:00–20:00)

	2025
Roda 2	207,230
Roda 4	346,174
Bus	23,765
Truck	80,341
Roda 4 atau lebih	450,280
Penumpang	2,772,669
Kendaraan	657,510

Kejadian Menonjol

Matra Laut, pada prinsipnya tidak ada kejadian menonjol selama masa Angkutan Laut Lebaran tahun 2025.

Perbantuan Kapal Negara dalam Mengurai Kepadatan Penumpang

No	Tanggal	Nama Kapal	Keterangan
1	10 April 2025	KN. Grantin P.211	Perbantuan angkut penumpang Raas - Celukan Bawang, Jumlah Penumpang : 58 Orang
2	9 April 2025	KN. Nusa Penida	Penumpang dari Raas – Celukan Bawang, jumlah 345 orang
3	27 Maret 2025	KN. Masalembo	Tanjung Perak – Masalembo, 79 orang
4	25 Maret 2025	CHUNDAMANI P-116	Celukan Bawang – Raas, 86 orang
5	24 Maret 2025	KN. Nusa Penida	Celukan Bawang – Raas, 227 orang
6	25 Maret 2025	KN. Nusa Penida	Celukan Bawang – Raas, 322 orang
7	26 Maret 2025	KN. Nusa Penida	Celukan Bawang – Raas, 309 orang
8	8 April 2025	KN. Nusa Penida	Celukan Bawang – Raas, 275 orang
9	10 April 2025	KN. Nusa Penida	Celukan Bawang – Raas, 300 orang



Sumber Subdit Sarana dan Prasarana

6. Posko Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

Posko dilaksanakan selama 18 hari mulai dari 18 Desember 2025 sampai dengan 5 Januari 2026, pada 264 titik pantau, Total armada yang dioperasikan sebanyak 703 kapal, dispensasi kapasitas penumpang diberikan pada 42 kapal penumpang dengan memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan, realisasi tiket gratis sampai dengan sebesar 100%.

Realisasi Kumulatif Angkutan Laut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 sebesar 2,254,733 orang, puncak arus periode pra natal terjadi pada tanggal 22 Desember 2025 sebesar 148,612 orang, sedangkan puncak arus periode pasca natal terjadi pada tanggal 28 Desember 2025 sebesar 150,009 orang.



Angkutan Laut Nataru 2025/2026

Tanggal	18 Desember	19 Desember	20 Desember	21 Desember	22 Desember	23 Desember	24 Desember
Hari	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa
2024	82.490	90.901	94.233	96.805	109.205	97.687	86.529
2025	104.293	114.381	135.798	144.517	128.509	123.340	108.793
Perkiraan 2025	124.606	112.809	127.299	145.507	148.683	137.630	124.140

Tanggal	25 Desember	26 Desember	27 Desember	28 Desember	29 Desember	30 Desember	31 Desember
Hari	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa
2024	77.130	86.701	91.115	100.423	89.156	85.459	70.080
2025	114.387	144.517	135.103	141.054	123.397	107.183	101.195
Perkiraan 2025	133.176	129.190	134.542	154.089	137.238	124.193	105.171

Tanggal	01 Januari	02 Januari	03 Januari	04 Januari	05 Januari
Hari	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
2024	64.057	87.879	70.434	69.722	109.030
2025	95.787	110.478	103.413	111.869	129.235
Perkiraan 2025	103.734	124.309	80.585	103.287	

Periode Pra Natal
Tertinggi :
22 Desember 2025

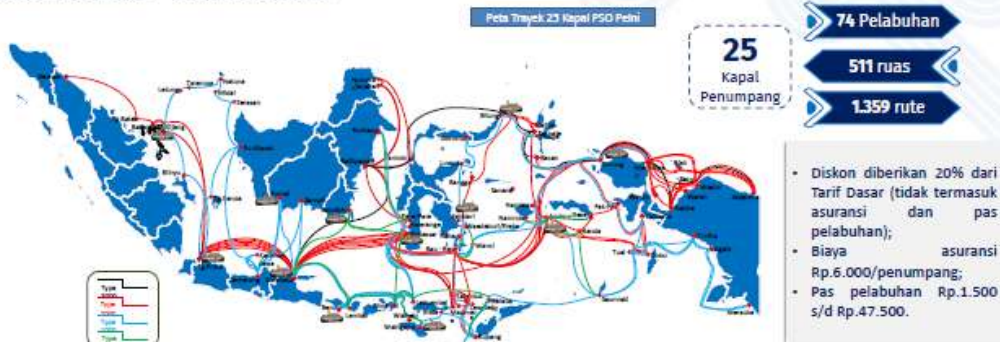
Periode Nataru
Tertinggi :
28 Desember 2025

Periode Pasca Tahun Baru
Tertinggi :
2 Januari 2026



Stimulus Diskon Transportasi Laut

Periode Natal 2025 – Tahun Baru 2026

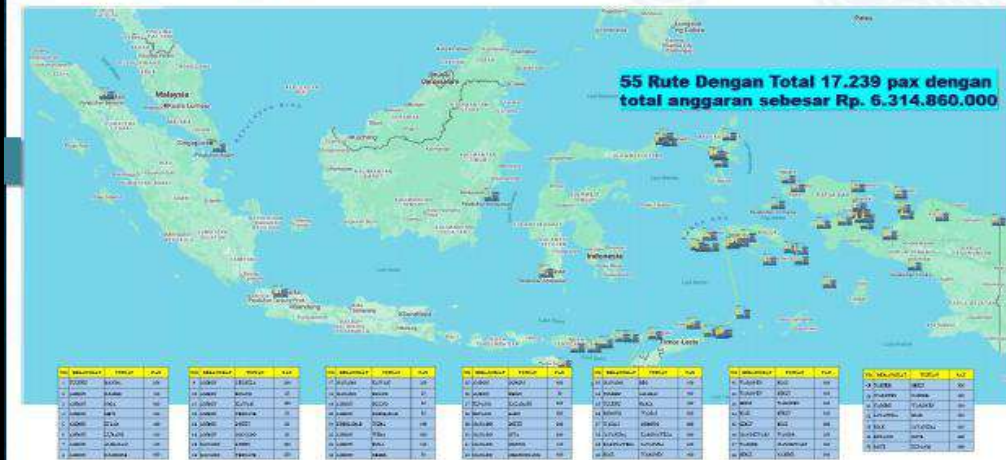


Operator	Jumlah Kapal	Jumlah Trayek	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Diskon	Target Penumpang	Keterangan
PT. PELNI (Persero)	25 Kapal	Seluruh Trayek Kapal PSO • 25 Trayek • 74 Pelabuhan • 511 Ruas • 1.359 Rute	17 Desember 2025 s/d 10 Januari 2026 (Lama hari layar kapal dari Pulau Jawa ke Wilayah Timur Indonesia rata-rata 7 Hari)	20% dari Tarif Dasar	405.881	Diberikan hanya untuk penumpang ekonomi



Rencana Tiket Gratis

Periode Natal 2025 – Tahun Baru 2026



Realisasi

Diskon Tiket dan Tiket Gratis

NO	PROGRAM	JUMLAH			
		KUOTA	SISA KUOTA	REALISASI	%
1	Diskon Tiket 20%	405,881	0	406.882	100,23%
2	Tiket Gratis	17.239	0	17.239	100%

Update 4 Jan 2026



Gambar 2.6 Posko Angkutan Nataru Tahun 2024/2025



II. Direktorat Kepelabuhanan

A. Kegiatan Dukungan di Bidang Kepelabuhanan

1. Layanan Perizinan di Direktorat Kepelabuhanan

Dalam rangka menjalankan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Kepelabuhanan sesuai amanat permenhub nomor 50 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelabuhan laut ditjen perhubungan laut mengevaluasi dan menerbitkan persetujuan maupun perizinan berusaha. Pada tahun 2025 Ditjen Perhubungan Laut telah melakukan Evaluasi dan menerbitkan persetujuan serta perizinan sejumlah total 1116 Perizinan meliputi :

- a) Sertifikat Standar Pembangunan, Pengoperasian, Penyesuaian, Pengembangan, Perpanjangan Pengoperasian, Perpanjangan Pembangunan, Perpanjangan Pengembangan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebanyak 779 Sertifikat;
- b) Penetapan Persetujuan Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri sebanyak 16 Penetapan;
- c) Penetapan Peningkatan Pengoperasian Terminal Khusus Secara Terus Menerus Selama 24 (dua puluh empat) jam Dalam Satu Hari Atau Selama Waktu Tertentu sebanyak 47 Penetapan;
- d) Penetapan Penggunaan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Untuk Sementara Melayani Kepentingan Umum sebanyak 138 Penetapan;
- e) Izin Pengoperasian Pemanfaatan Garis Pantai Tempat Penimbunan Kayu/Non Tempat Penimbunan Kayu sebanyak 96 Penetapan;
- f) Sertifikat Standar Kegiatan Kerja Keruk, Kegiatan Kerja Reklamasi, Kegiatan Kerja Pengerukan Dan Reklamasi, Perpanjangan Kegiatan Kerja Keruk, Perpanjangan Kegiatan Kerja Reklamasi, Perpanjangan Kegiatan Kerja Keruk Dan Reklamasi sebanyak 40 Penetapan.

2. Studi Perencanaan Pelabuhan (Rencana Induk Pelabuhan, SID, DED Fasilitas Pelabuhan, Studi Lingkungan)

Untuk melengkapi Dokumen Perencanaan pada rencana pembangunan pelabuhan baru, telah dilaksanakan studi-studi sebagai berikut :

a. Rencana Induk Pelabuhan

Tahun 2025 telah dilaksanakan Pekerjaan Penyusunan Studi Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan pada 9 (sembilan) paket/lokasi,

- 1) Studi Penyusunan Rencana Induk, Daerah Lingkungan Kerja, dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawio, Pelabuhan Kawaluso dan Pelabuhan Para Provinsi Sulawesi Utara
- 2) Studi Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Tobelo Provinsi Maluku Utara



- 3) Studi Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Wunlah dan Seira Provinsi Maluku
- 4) Studi Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Saumlaki dan Pelabuhan Adault Provinsi Maluku
- 5) Studi Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Balauring dan Wulandoni Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 6) Studi Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Tual dan Elat Provinsi Maluku
- 7) Updating Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan
- 8) Updating Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Linau Bintuhan Provinsi Bengkulu
- 9) Updating Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Wanam Provinsi Papua

b. Detail Engineering dan Desain (DED)

Tahun 2025 telah dilaksanakan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Fasilitas Pelabuhan pada 9 (sembilan) lokasi/paket, diantaranya :

- 1) Studi Detail Engineering Dan Design (DED) Fasilitas Pelabuhan Laut Lakor Provinsi Maluku;
- 2) Studi Detail Engineering Dan Desain (DED) Fasilitas Pelabuhan Laut Terong Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 3) Studi Detail Engineering Design (DED) Fasilitas Pelabuhan Laut Waren Provinsi Papua;
- 4) Studi Detail Engineering Design (DED) Fasilitas Pelabuhan Laut Oransbari Provinsi Papua Barat;
- 5) Studi Detail Engineering Dan Design (DED) Pelabuhan Meranti Provinsi Riau;
- 6) Studi Detail Engineering Dan Design (DED) Fasilitas Pelabuhan Laut Kroing Provinsi Maluku;
- 7) Studi Detail Engineering Dan Design (DED) Terminal Penumpang Pelabuhan Nusa Penida Provinsi Bali;
- 8) Studi Detail Engineering Dan Design (DED) Fasilitas Darat Pelabuhan Wanam Provinsi Papua Selatan;
- 9) Studi Detail Engineering Dan Design (DED) Terminal Bandar Sri Junjungan Pelabuhan Dumai Provinsi Riau.

c. Studi Lingkungan

Tahun 2025 telah dilaksanakan Pekerjaan Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL, DPLH, UKL-UPL) Pelabuhan Laut pada 6 (enam) lokasi, yaitu :

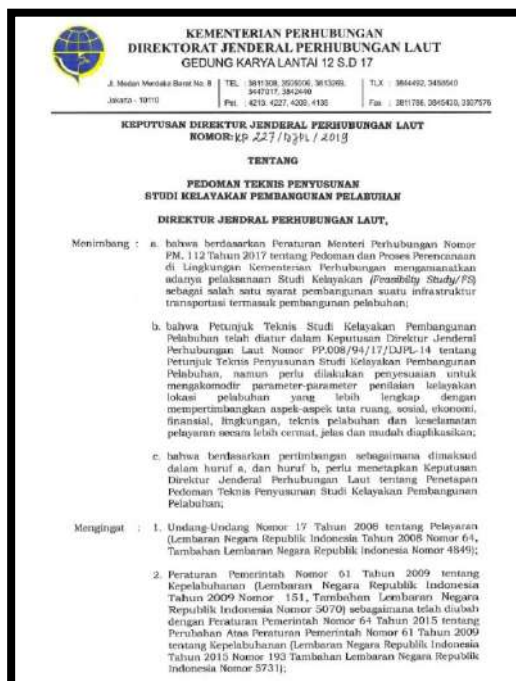
- 1) Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (DPLH) Pelabuhan Bunta Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;



- 2) Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL) Pelabuhan Mulu Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku;
- 3) Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL) Pelabuhan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat;
- 4) Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (DPLH) Pelabuhan Salura Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 5) Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (DPLH dan UKL-UPL) Pelabuhan Kobisadar Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku;
- 6) Studi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Pelabuhan Simalepet Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat.

3. Penyempurnaan Petunjuk Teknis Penyusunan Studi Kelayakan

Guna menunjang kegiatan pembangunan, diperlukan sebuah studi yang mampu memberikan gambaran secara lebih komprehensif tentang kelayakan pada beberapa aspek yang dianggap penting sebelum dimulainya pembangunan pelabuhan tersebut. Disamping itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan mengamanatkan adanya pelaksanaan Studi Kelayakan sebagai salah satu syarat pembangunan suatu infrastruktur transportasi, termasuk dalam hal ini pelabuhan. Sebagai pedoman dalam penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.227/DJPL/2019 tanggal 15 Maret 2019



Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas dokumen studi kelayakan yang lebih baik dan komprehensif, Pada tahun 2025 Direktorat Kepelabuhanan melakukan penyempurnaan pedoman teknis studi kelayakan



dengan memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan terkait. Pelaksanaan penyusunan penyempurnaan Juknis FS pada TA 2025 dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan konsultan penyusun. Hasil reviu Juknis FS akan digunakan sebagai pedoman tata cara pengusulan, penyusunan, dan penetapan studi FS. Selain itu, Juknis FS digunakan juga sebagai pedoman evaluasi dokumen hasil studi FS sebelum ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Kegiatan rapat pembahasan penyempurnaan Juknis FS dilaksanakan pada tanggal 13 November, 21 November, dan 12 Desember 2025.

4. Penyusunan Petunjuk Teknis Penetapan Perairan Wajib Pandu dan Perairan Pandu Luar Biasa

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan maritim, instansi tetap mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2015 bahwa penyediaan jasa pemanduan dan penundaan kapal diberikan atas dasar pertimbangan keselamatan, keamanan berlayar, serta perlindungan lingkungan maritim. Perairan pandu terdiri dari Perairan Wajib Pandu dan Perairan Pandu Luar Biasa. Pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan. Perairan Wajib Pandu ditetapkan oleh Menteri Perhubungan melalui Keputusan Menteri Perhubungan, dan untuk penetapan Perairan Pandu Luar Biasa Menteri melimpahkan wewenang kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui usulan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan selaku Pengawas Pemanduan.

Selaras dengan reorganisasi melalui PM No. 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Kepelabuhanan kini memegang tugas pokok dan fungsi dalam penetapan Perairan Wajib Pandu dan Pandu Luar Biasa. Untuk itu Pada tahun 2025 Direktorat Kepelabuhanan menyusun panduan dalam menyiapkan dan melaksanakan proses evaluasi dan penetapan Perairan Wajib Pandu dan Pandu Luar Biasa. Juknis tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyelenggara pelabuhan dalam mengusulkan penetapan perairan kepada Menteri Perhubungan maupun Direktur Jenderal Perhubungan Laut, serta dapat menjadi pedoman evaluasi dokumen usulan penetapan perairan bagi direktorat teknis terkait. Penyusunan Juknis PWP dan PPLB dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan konsultan penyusun. Rapat pembahasan penyusunan Juknis PWP dan PPLB dilaksanakan pada tanggal 27 November 2025.

5. Penyempurnaan Petunjuk Teknis Rencana Induk Pelabuhan

Mengingat pelabuhan harus dikembangkan sesuai kebutuhan dan terintegrasi dengan rencana pengembangan wilayah, serta hierarkinya karena pelabuhan merupakan bagian dari rantai logistik nasional dan menjadi bagian yang tidak



terpisahkan dari perkembangan suatu wilayah.

Penyempurnaan Petunjuk Teknis Rencana Induk Pelabuhan sebagai media sosialisasi dan pembinaan teknis kepada penyelenggara pelabuhan dan pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar para aparatur tersebut dapat memahami prosedur penetapan rencana induk pelabuhan. RIP sendiri telah memiliki petunjuk teknis melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PP.001/2/19/DJPL-14 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, namun terdapat perkembangan peraturan, pembaharuan standar teknis sehingga pada tahun 2025 Direktorat Kepelabuhanan melakukan upaya Penyempurnaan Petunjuk Teknis rencana induk Pelabuhan guna menjadi acuan dalam Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pelabuhan.

Kegiatan penyempurnaan Juknis RIP dilaksanakan untuk mereviu Juknis Penyusunan RIP yang telah ditetapkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PP.001/2/19/DJPL-14 Tanggal 5 Agustus 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan. Reviu juknis penyusunan RIP yang dilaksanakan TA 2025 berfokus pada simplifikasi dokumen RIP. Beberapa poin yang disimplifikasi antara lain: jumlah dokumen hasil studi penyusunan RIP yang semula 3 (tiga) dokumen menjadi 2 (dua) dokumen; lampiran dokumen RIP untuk penetapan yang semula menggunakan format kertas A3 menjadi format kertas F4 dengan substansi antara lain gambaran umum pelabuhan, proyeksi pengembangan pelabuhan, rencana pengembangan pelabuhan, dan rancangan DLKr DLKp; dan lainnya.

Pelaksanaan kegiatan penyempurnaan Juknis RIP dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan konsultan penyusun sampai dapat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 598 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan.

- 1) Kick-Off Meeting Penyempurnaan Juknis Penyusunan RIP Pada Tanggal 15 Oktober 2025





- 2) Rapat Pembahasan Juknis Penyusunan RIP Pada Tanggal 30 Oktober S.D. 6 November 2025



- 3) Konsultasi publik juknis penyusunan RIP pada tanggal 13 November 2025;
- 4) Sosialisasi Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP 598 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan



6. Penyusunan Petunjuk Teknis di bidang Perancangan Pelabuhan
Pada tahun 2025, Direktorat Kepelabuhanan telah menyusun petunjuk teknis di bidang perancangan pelabuhan sebanyak 5 (lima) Juknis sebagai berikut :
 - 1) Petunjuk Teknis Perencanaan Solar Panel Pada Fasilitas Pelabuhan Laut;
 - 2) Petunjuk Teknis Fasilitas Pelabuhan untuk Tipe Kapal Ro-Ro dan LCT;
 - 3) Petunjuk Teknis Penyusunan Analisa Harga Satuan (AHS) dalam Rangka;
 - 4) Penyusunan Engineering Estimate (EE) Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan;
 - 5) Petunjuk Teknis Gaya Lingkungan Pelabuhan yang Berasal dari Hidro Oceanografi



7. Pendampingan Kegiatan Inspeksi Eksisting Di Bidang Program Pembangunan Faspel Laut

- 1) Peninjauan Lapangan Bersama Terhadap Dermaga Rakyat yang Berada pada Aset Pelabuhan Milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu pada (20-22 Januari 2025)



- 2) Kunjungan Lapangan dalam rangka Inventarisasi dan Identifikasi Kebutuhan Anggaran Pembangunan Infrastruktur Tahun 2026 serta Progres Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025, Sulawesi Selatan (24-26 September 2025)





- 3) Inventarisasi dan Identifikasi Kebutuhan Anggaran Pembangunan Infrastruktur Kementerian Perhubungan Tahun 2026 serta Proses Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 Pelabuhan Panarukan (30-3 Oktober 2025)



8. Evaluasi Pelimpahan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal
Pada tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan evaluasi berkala dua tahunan terhadap pelimpahan penyelenggaraan jasa pemanduan dan penundaan kapal kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dan Pengelola Terminal Khusus (Tersus) yang telah menerima pelimpahan kewenangan tersebut. Sepanjang tahun 2025, kegiatan evaluasi dilaksanakan sebanyak 50 (lima puluh) kegiatan pada berbagai lokasi pelabuhan yang menjadi objek pelimpahan.

Hasil dari kegiatan evaluasi tersebut adalah Dokumen berita acara rapat pembahasan berfungsi sebagai catatan resmi yang memuat hasil pembahasan, kesimpulan rapat, serta rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan. Dengan adanya dokumentasi tersebut, seluruh proses evaluasi dapat tercatat secara akuntabel, transparan, dan terdokumentasi dengan baik, sekaligus menjadi dasar dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa pemanduan dan penundaan kapal di lingkungan pelabuhan

III. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

A. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dalam Angka

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Transportasi Laut yang telah tertuang pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025 - 2029, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis serta evaluasi dan pelaporan di bidang perkapalan dan kepelautan. Berikut Capaian Direktorat Perkapalan dan Kepelautan pada Tahun 2025 :



1. Sumber Daya Bidang Perkapalan dan Kepelautan

Dalam bidang Perkapalan dan Kepelautan, terdapat tenaga teknis yang mendukung berjalannya tugas pokok dan fungsi sehari-hari, terutama dalam menjalankan proses pelayanan terhadap Masyarakat. Selain itu Direktorat juga menghimpun data yang menjadi lingkup penugasan yang dilaksanakan.

Tabel 2.1 SDM Teknis Bidang Perkapalan dan Kepelautan

SDM Teknis	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Marine Inspector</i> (MI A)	332	360	404	433	463	518	561
<i>Asisten Marine Inspector</i> (MI B)	394	420	490	522	584	620	523
Ahli Ukur Kapal					351	366	400
<i>Auditor ISM Code</i>	174	195	234	280	316	316	350

Tabel 2.2 Kapal Berbendera Indonesia

SDM Teknis	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kapal Penumpang	3.242	4.506	4.798	5.043	5.103	5.103	5.886
Kapal Barang	39.510	43.037	44.177	45.329	45.193	45.768	51.197
Kapal Penangkap Ikan	39.330	46.194	49.227	51.708	52.193	52.193	56.203

Tabel 2.3 Pelaut Indonesia

Tahun	Jumlah
2019	162.862
2020	81.696
2021	68.258
2022	100.965
2023	101.265
2024	91.245
2025	99.162

2. Uji Petik Bidang Kelaiklautan Kapal

Guna mewujudkan penyelenggaraan transportasi laut yang selamat, aman, dan terkoordinasi, telah dilaksanakan rangkaian uji petik angkutan laut di sejumlah lokasi untuk memastikan kelaiklautan kapal, khususnya bagi kapal penumpang selama menghadapi masa libur Lebaran dan juga masa libur Natal dan Tahun Baru



Tabel 2.4 Uji Petik Angkutan Laut

Tahun	Uji Petik	Lokasi
2019	Angkutan Lebaran	16 Lokasi
	Natal dan Tahun Baru	14 Lokasi
2020	Angkutan Lebaran	3 Lokasi
	Natal dan Tahun Baru	8 Lokasi
2021	Angkutan Lebaran	15 Lokasi
	Natal dan Tahun Baru	16 Lokasi
2022	Angkutan Lebaran	22 Lokasi
	Natal dan Tahun Baru	16 Lokasi
2023	Angkutan Lebaran	24 Lokasi
	Natal dan Tahun Baru	12 Lokasi
2024	Angkutan Lebaran	18 Lokasi
	Natal dan Tahun Baru	15 Lokasi
2025	Angkutan Lebaran	1 Lokasi
	TSDP	9 Lokasi
	Natal dan Tahun Baru	15 Lokasi

IV. Direktorat Kenavigasian

A. Arah Kebijakan Direktorat Kenavigasian dan Strategi Tahun 2020 – 2025

Dalam rangka mewujudkan pelayanan di bidang Kenavigasian yang handal maka pada periode 2025-2029, Direktorat Kenavigasian akan melakukan sejumlah arah kebijakan umum berikut ini:

- Peningkatan SDM melalui diklat teknis dan manajerial di bidang
- SBNP, Telekomunikasi Pelayaran, alur pelayaran, dan kapal negara kenavigasian;
- Peningkatan kecukupan armada kapal negara;
- Peningkatan coverage area fasilitas telekomunikasi pelayaran;
- Penambahan jumlah penetapan alur pelayaran.

Pada Tabel 2.5 disampaikan arah kebijakan dan strategi yang akan diterapkan oleh Direktorat Kenavigasian dalam rangka mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan untuk perioda 2025-2029.

Tabel 2.5 Arah Kebijakan Dan Strategi Direktorat Kenavigasian 2025-2029

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
SK.4 Meningkatnya kinerja pelaksanaan	Peningkatan tingkat kecukupan SBNP	a) Pembangunan Menara Suar b) Pembangunan Rambu Suar



kegiatan pembangunan dan pengelolaan Kenavigasian	Peningkatan tingkat keandalan SBNP	a) Peningkatan Kinerja Pemeliharaan Menara Suar b) Peningkatan Kinerja Pemeliharaan Rambu Suar c) Replacement Menara Suar d) Replacement Rambu Suar e) Replacement Pelampung Suar
	Peningkatan Persentase SBNP yang menggunakan Solar Cell	a) Pengadaan Lampu Menara Suar dengan Solar Cell b) Peningkatan inventarisasi jumlah SBNP ber-Solar Cell
	Peningkatan SDM melalui diklat teknis dibidang SBNP	Diklat level 1.1 AtoN Manager
	Peningkatan tingkat kecukupan SROP/ GMDSS	a) Pengadaan GMDSS b) Melaksanakan Upgrade GMDSS
	Peningkatan tingkat kecukupan SROP/ GMDSS	a) Pemantauan jam kerja b) Mengevaluasi kecukupan sumber daya manusia
	Peningkatan tingkat kecukupan VTS	a) Monitoring Pembangunan VTS b) Monitoring Upgrade VTS
	Peningkatan tingkat keandalan VTS	a) Peningkatan Kinerja Pemeliharaan VTS dan fasilitas penunjangnya b) Melaksanakan monitoring
	Peningkatan jumlah alur dan perlintasan yang telah ditetapkan	a) Monitoring dan Pendampingan survey alur mandiri oleh Distrik Navigasi (Tambahan: Monitoring) b) Penetapan alur pelayaran c) Monitoring Peralatan Survei
	Peningkatan Kecukupan Kapal Negara Kenavigasian	a) Pembangunan Kapal Negara b) Pengadaan Boat Survey
SK.6 Terlaksananya	Peningkatan kompetensi pegawai Direktorat	a) Penyelenggaraan diklat/bimtek teknis maupun



dukungan manajemen dan teknis di Lingkungan Direktorat Kenavigasian	Kenavigasian	manajerial bidang kenavigasian b) Pengukuran target jam diklat tiap pegawai
	Peningkatan kemudahan akses informasi dan data di Direktorat Kenavigasian	a) Pembuatan Rencana Induk Kenavigasian b) Penyusunan Juknis terkait Pelaksanaan Survey Alur c) Melaksanakan studi/kajian teknis d) Peningkatan Jumlah Pedoman Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) di bidang Kenavigasian
	Pemenuhan kelengkapan dokumen SAKIP	a) Penyusunan Rencana Strategis b) Penyusunan LKIP c) Penyusunan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
	Peningkatan tingkat kecukupan SROP/ GMDSS	a) Pengadaan GMDSS b) Melaksanakan Upgrade GMDSS
	Peningkatan tingkat kecukupan SROP/ GMDSS	a) Pemantauan jam kerja b) Mengevaluasi kecukupan sumber daya manusia
	Peningkatan tingkat kecukupan VTS	a) Monitoring Pembangunan VTS b) Monitoring Upgrade VTS
	Peningkatan tingkat keandalan VTS	a) Peningkatan Kinerja Pemeliharaan VTS dan fasilitas penunjangnya b) Melaksanakan monitoring
	Peningkatan jumlah alur dan perlintasan yang telah ditetapkan	a) Monitoring dan Pendampingan survey alur mandiri oleh Distrik Navigasi (Tambahan: Monitoring) b) Penetapan alur pelayaran c) Monitoring Peralatan Survei
	Peningkatan Kecukupan Kapal Negara Kenavigasian	a) Pembangunan Kapal Negara b) Pengadaan Boat Survey



SK.6 Terlaksananya dukungan manajemen dan teknis di Lingkungan Direktorat Kenavigasian	Peningkatan kompetensi pegawai Direktorat Kenavigasian	a) Penyelenggaraan diklat/bimtek teknis maupun manajerial bidang kenavigasian b) Pengukuran target jam diklat tiap pegawai
	Peningkatan kemudahan akses informasi dan data di Direktorat Kenavigasian	a) Pembuatan Rencana Induk Kenavigasian b) Penyusunan Juknis terkait Pelaksanaan Survey Alur c) Melaksanakan studi/kajian teknis d) Peningkatan Jumlah Pedoman Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) di bidang Kenavigasian
	Pemenuhan kelengkapan dokumen SAKIP	a) Penyusunan Rencana Strategis b) Penyusunan LKIP c) Penyusunan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
		a) Penyusunan Perjanjian Kinerja b) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
	Peningkatan Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	a) Pengusulan Distrik Navigasi sebagai Badan Layanan Umum b) Memaksimalkan penyerapan anggaran untuk meningkatkan fasilitas
	Peningkatan akuntabilitas laporan keuangan dan BMN	a) Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan b) Pengelola PNBP (Honorarium) c) Operasional Perkantoran (Honorarium) d) Melaksanakan prosedur SPIP e) Melaksanakan bimbingan teknis penatausahaan BMN



B. Ringkasan Laporan Keuangan

Total Anggaran Direktorat Kenavigasian pada awal tahun sebesar Rp. 117.104.220.000,-, kemudian terdapat beberapa penghematan atau efisiensi sehingga anggaran Direktorat Kenavigasian menjadi Rp. 97.355.165.000,- dan untuk realisasi yang dapat dicapai oleh Direktorat Kenavigasian sampai akhir tahun sebesar Rp. 26.958.075.076,- (27,69%) dan sisa anggaran Rp. 70.397.089.924,- dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Laporan Keuangan Direktorat Kenavigasian

NO	URAIAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR
1	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut	110.161.309.000	81.608.113.000
2	Penunjang Teknis Transportasi Laut	57.732.207.000	8.606.172.000
3	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Laut	7.140.880.000	7.140.880.000
Total Pagu		175.034.396.000	97.355.165.000
Total Realisasi			26.958.075.076
Total Sisa Pagu			70.397.089.924

C. Penyediaan Infrastruktur

1. Telah dilakukan pemeliharaan dan pengawasan SBNP di Selat Malaka dan Singapura Sebanyak 2 (Dua) kali pada tanggal 25 Mei-19 Juni 2025 dan 9 November – 5 Desember 2025.



2. Kegiatan Pengadaan Alat Ukur Keandalan Telekomunikasi Pelayaran
Pengadaan alat ukur ini bertujuan untuk menyediakan peralatan yang dapat digunakan dalam kegiatan pengujian, pemeriksaan, dan evaluasi kinerja sistem telekomunikasi pelayaran. Dengan tersedianya alat ukur yang memadai, petugas teknis dapat melakukan pemantauan terhadap kondisi peralatan dan jaringan komunikasi secara lebih akurat dan efektif



Gambar 2.7 Alat Ukur Keandalan Telekomunikasi Pelayaran

3. Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan MSI

Pelaksanaan pengadaan sarana penunjang kegiatan *Maritime Safety Information (MSI)* bertujuan mendukung operasional *Maritime Coordination Center (MCC)* Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam meningkatkan efektivitas koordinasi harian wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia. Pengadaan meliputi perangkat pendukung komunikasi dan rapat, seperti kamera grup, laptop, speaker portabel, mikrofon, serta perlengkapan pendukung lainnya. Sarana tersebut digunakan untuk memperkuat koordinasi antara Direktorat Kenavigasian dan seluruh Distrik Navigasi dalam pengumpulan informasi serta konfirmasi kejadian di seluruh wilayah Indonesia. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya perangkat MSI yang terpasang dan berfungsi optimal di MCC, sehingga mendukung sistem komunikasi dan pengawasan yang lebih efektif, memperkuat fungsi MCC sebagai pusat koordinasi lalu lintas pelayaran yang terintegrasi, serta meningkatkan pelayanan sesuai standar keselamatan pelayaran.



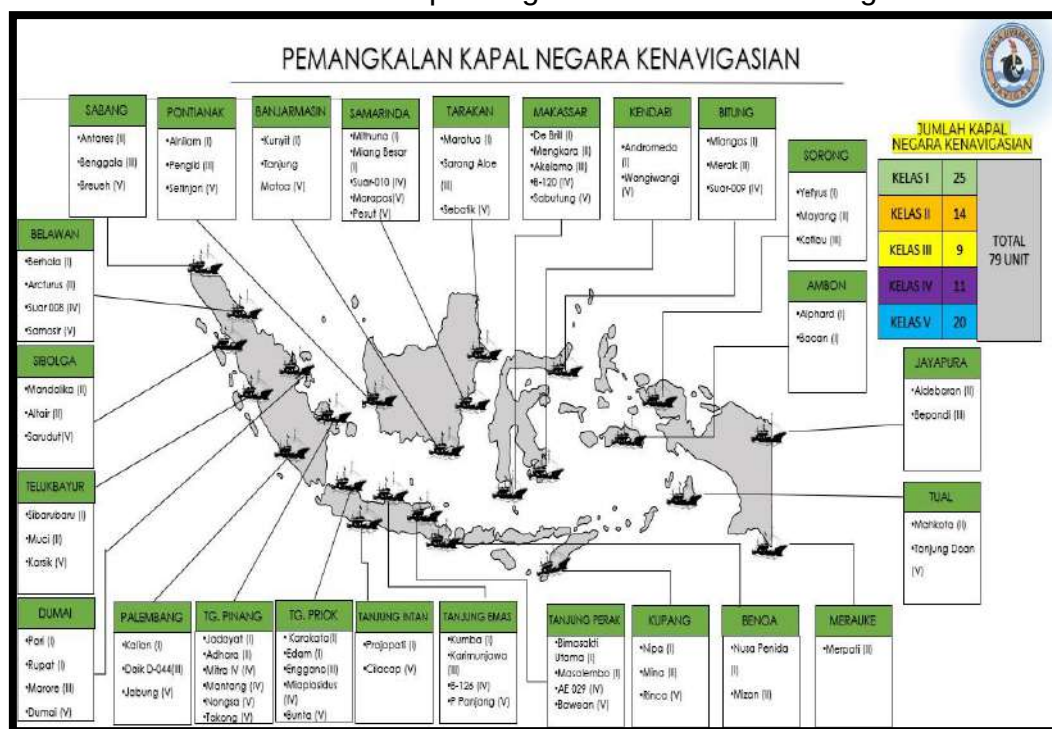
Gambar 2.8 Sarana Penunjang Kegiatan MSI



4. Jumlah Armada Kapal Negara Kenavigasian

Pada tahun 2025 Direktorat Kenavigasian, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memiliki **79 (tujuh puluh sembilan) unit Kapal Negara Kenavigasian** yang tersebar pada 25 (dua puluh lima) Unit Pelaksana Teknis/Distrik Navigasi

Gambar 2.9 Jumlah Kapal Negara dan Lokasi Pemangkalan



Pada tahun 2025 Direktorat Kenavigasian melaksanakan kegiatan Monitoring Kondisi Teknis pada Kapal Negara Kenavigasian, uraian sebagai berikut :

Distrik Navigasi	Pelaksanaan	Nama Kapal	Kelas Kapal
Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Kupang	12 s.d 14 November 2025	KN. Nipa	I
Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjung Pinang	10 s.d 12 November 2025	KN. Jadayat	I



5. Umur dan Kondisi Teknis Kapal Negara Kenavigasian

Tabel 2.7 Umur Kapal Negara Kenavigasian

Umur Kapal	Kelas Kapal (unit)					
	I	II	III	IV	V	Total
>40	5	2	1	7	0	15
10 – 20	0	0	0	0	0	0
20 – 30	1	12	0	2	0	15
30 – 40	4	0	3	2	2	11
>10	15	0	5	0	18	38
						79

Tabel 2.8 Kondisi Kapal Negara Kenavigasian

Kondisi Teknis Kapal (%)	Kelas Kapal (unit)					
	I	II	III	IV	V	Total
> 90	-	-	-	-	4	4
80 – 90	2	-	6	-	1	9
70 – 80	12	-	1	-	7	20
60 – 70	11	11	1	5	5	33
40 - 60	-	1	1	6	3	11
< 40	-	2	0	0	0	2
						79

Upaya untuk meningkatkan keandalan operasional Kapal Negara Kenavigasian dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Memaksimalkan pelaksanaan perawatan tahunan, perawatan besar dan rekondisi armada Kapal Negara Kenavigasian;
- 2) Bagi kapal yang belum berumur 40 tahun dan kondisi teknisnya < 60 %, memperpanjang masa tugas operasional kapal dengan cara rekondisi teknis, namun hal ini memerlukan biaya yang sangat besar tetapi hasilnya belum tentu optimal;
- 3) Scrapping bagi kapal-kapal yang kondisi teknis dibawah 40 %, atau kapal tidak laik operasi;
- 4) Relokasi pemangkalan kapal dalam rangka efisiensi dan efektivitas armada kapal disesuaikan dengan beban kerja di wilayah kerja yang bersangkutan;



5) Peremajaan dengan pengadaan kapal baru sesuai kebutuhan operasional

6. Sinkronisasi Teknis Penetapan Alur Pelayaran

Telah dilaksanakannya Sinkronisasi Teknis Penetapan Alur Pelayaran dengan rincian lokasi sebagai berikut :

Tabel 2.9 Kegiatan Sinkronisasi Teknis Penetapan Alur Pelayaran

No	Sinkronisasi Teknis Penetapan Alur - Pelayaran	Tanggal	Keterangan
1	Alur Perlintasan Pulokerto, Provinsi Sumatera Selatan	23-25 April 2025	Terlaksana
2	Pelabuhan Sarmi, Provinsi Papua	28-30 April 2025	Terlaksana
3	Pelabuhan Kalabahi, Provinsi Nusa Tenggara Timur	28-30 Juli 2025	Terlaksana
4	Pelabuhan Selat Panjang, Provinsi Riau	04-06 Agustus 2025	Terlaksana
5	Pelabuhan Yenggarbun, Provinsi Papua	25-27 Agustus 2025	Terlaksana
6	Pelabuhan Labuan Uki, Provinsi Sulawesi Utara	10-12 September 2025	Terlaksana
7	Pelabuhan Tayando, Provinsi Maluku	17-19 September 2025	Terlaksana
8	Pelabuhan Wanam, Provinsi Papua Selatan	24-26 September 2025	Terlaksana
9	Pelabuhan Ulu Siau, Provinsi Sulawesi Utara	01-03 Oktober 2025	Terlaksana
10	Pelabuhan Sungai Guntung, Provinsi Riau	06-08 Oktober 2025	Terlaksana
11	Pelabuhan Teluk Batang/Teluk Melano, Provinsi Kalimantan Barat	13-15 Oktober 2025	Terlaksana
12	Pelabuhan Pagimana, Provinsi Sulawesi Tengah	29-31 Oktober 2025	Terlaksana
13	Pelabuhan Kur, Provinsi Maluku	03-05 November 2025	Terlaksana
14	Pelabuhan Singkil, Provinsi Aceh	17-19 November 2025	Terlaksana
15	Pelabuhan Talang Duku	26-28 November 2025	Terlaksana



	(Sungai Batanghari), Provinsi Jambi		
--	-------------------------------------	--	--

7. Penerbitan Sertifikat Standar di bidang telekomunikasi pelayaran melalui aplikasi e-licensing, Adapun terdapat 6 (enam) jenis layanan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.10 Jenis Sertifikat Standar di Bidang Telekomunikasi Pelayaran

No.	Jenis Perizinan	Jumlah		
		Baru	Perpanjangan	Jumlah Total
1.	Sertifikat Standar Penetapan Frekuensi Marine Untuk Komunikasi Stasiun Radio Kapal	7.186	1.780	8.966
2.	Sertifikat Standar Penetapan Frekuensi Marine Untuk Komunikasi Stasiun Radio Pantai	90	45	135
3.	Sertifikat Standar Registrasi Nomor Maritime	1.677	-	1.677
	Sertifikat Standar Registrasi Nomor <i>Maritime Mobile Service Identities</i> (MMSI) Pantai	4	-	4
4.	Sertifikat Standar Pemberian Kuasa Perhitungan Jasa Telekomunikasi Pelayaran Dalam Dinas Bergerak <i>Accounting</i>	2	2	4
5.	Sertifikat Standar Penyelenggaraan Vessel	-	2	2
6.	Sertifikat Standar Registrasi Izin Komunikasi	160	-	160
	JUMLAH TOTAL	9.119	1.829	10.948

V. Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran

A. Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, Direktorat KPLP menunjukkan capaian kinerja yang optimal, dimana sebagian besar indikator kinerja kegiatan mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut antara lain:

- Persentase pemenuhan kebutuhan kapal negara patroli sebesar 100%;
- Tingkat keandalan kapal negara patroli sesuai target yang ditetapkan;



- c) Pemenuhan kebutuhan bangunan operasional sebesar 100%;
- d) Pelaksanaan patroli dan pengawasan sebesar 100%;
- e) Penyelesaian layanan jasa KPLP sebesar 100%;
- f) Penyusunan NSPK sebesar 100%;
- g) Dukungan manajemen dan tata kelola organisasi sebesar 100%

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara efektif serta selaras dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja seperti tertera pada tabel.

Tabel 2.11 Capaian Kinerja

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Pemenuhan Kebutuhan Kapal Negara Patroli	100	100	100
2	Keandalan Kapal Negara Patroli	93,20	93,20	100
3	Pemenuhan Bangunan Operasional	100	100	100
4	Keandalan Bangunan Operasional	93,20	93,20	100
5	Supervisi Dugaan Tindak Pidana Pelayaran	100	100	100
6	Penyelesaian Layanan Jasa KPLP	100	100	100
7	Keberhasilan MARPOLEX	100	100	100
8	Penanggulangan Pencemaran	100	100	100
9	Pemenuhan Kapal Patroli Lainnya	100	100	100
10	Keandalan Kapal Patroli Lainnya	93,20	93,20	100
11	Pemenuhan Peralatan Operasional	100	100	100
12	Keandalan Peralatan Operasional	93,20	93,20	100
13	Resume Gelar Perkara	100	100	100
14	Pelaksanaan Patroli	100	100	100
15	Penerbitan SPB	100	100	100
16	Penyusunan Kebijakan KPLP	100	100	100
17	Penyusunan NSPK	100	100	100
18	Layanan Perkantoran	100	100	100



19	Pengembangan Kompetensi SDM	100	100	100
20	Monev dan Pelaporan	100	100	100
21	Kepatuhan Pelaporan	100	100	100
22	Layanan Bantuan Hukum	100	100	100
23	Kegiatan Pendukung	100	100	100
24	PNBP	100	100	100
25	Kualitas Anggaran (IKPA)	100	100	100
26	Layanan Internal	100	100	100

Tabel. 2.12 Capaian Indikator Program (IKP) 2025

No	Indikator Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Tingkat Keselamatan Transportasi Laut	100	100	100
2	Tingkat Keamanan Transportasi Laut	100	100	100

Tabel. 2.13 Capaian Kinerja Operasional KPLP Tahun 2025

No	Uraian Kegiatan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total
1	Supervisi Dugaan Tindak Pidana Pelayaran	0	2	2	0	4
2	Sertifikat ISSC	182	163	17	177	539
3	Sertifikat SoCPF	49	42	56	44	191
4	Izin Usaha	1	0	1	1	3
5	Izin Bangun	5	2	4	5	16
6	Izin Survey / PBA	211	245	311	395	1.162
7	Rekomendasi TPBB (Barang Berbahaya)	2	0	7	0	9
8	Rekomendasi Lab Barang Curah Padat	0	2	1	0	3
9	Rekomendasi Lab Packaging BB	0	0	0	0	0



10	Rekomendasi UN Mark	4	15	13	14	46
11	Rekomendasi Not Listed Cargo IMSBC	56	30	15	0	101
12	Sertifikat Diklat Barang Berbahaya	287	319	341	318	1.265
13	Sertifikat Diklat Barang Curah Padat	209	213	207	216	845
14	Resume Gelar Perkara	1	2	2	2	7
15	SPB	353.458	409.121	1.298.568	296.856	2.357.003
16	Kecelakaan Kapal	35	17	13	24	89
17	Layanan Bantuan Hukum	0	0	0	1	1
18	Monitoring dan Evaluasi	3	5	7	3	18

B. Pengelolaan Anggaran

1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Direktorat KPLP Tahun 2025 sebesar Rp72.756.593.151 atau sebesar 99,98% dari total pagu anggaran sebesar Rp72.774.159.000. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran berada pada kategori sangat optimal dan mencerminkan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Seluruh anggaran yang tersedia telah dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas secara efektif.

Realisasi anggaran tertinggi terdapat pada kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut yang mencapai 100%, diikuti oleh kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Laut sebesar 100%, serta kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum sebesar 98,31%.

Tabel 2.14 Realisasi Anggaran Direktorat KPLP

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Laut	977.240.000	960.766.700	98,31%



2	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut	62.088.086.000	62.087.126.003	100,00%
3	Penunjang Teknis Transportasi Laut	9.708.833.000	9.708.700.448	100,00%
Total		72.774.159.000	72.756.593.151	99,98%

2. Efektivitas Penggunaan Anggaran

Efektivitas penggunaan anggaran Direktorat KPLP Tahun 2025 ditunjukkan melalui ketercapaian kinerja yang optimal, dimana seluruh indikator kinerja kegiatan mencapai target yang telah ditetapkan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah memberikan hasil yang sesuai dengan perencanaan, yang tercermin dari:

- Tercapainya seluruh indikator kinerja kegiatan;
- Terlaksananya kegiatan patroli dan pengawasan secara optimal;
- Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana operasional
- Optimalnya pelaksanaan pelayanan jasa KPLP.

3. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat KPLP Tahun 2025 ditunjukkan melalui optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia dengan tetap mempertahankan capaian kinerja yang tinggi.

Hal ini tercermin dari:

- Tingkat penyerapan anggaran yang tinggi (99,98%);
- Minimnya sisa anggaran sebesar Rp17.565.849;
- Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan waktu yang telah ditetapkan;
- Tidak adanya deviasi signifikan antara perencanaan dan realisasi anggaran.

4. Permasalahan dan Upaya Perbaikan

Dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran, masih terdapat beberapa kendala, antara lain:

- Adanya sisa anggaran pada beberapa kegiatan;
- Kebutuhan peningkatan ketepatan perencanaan anggaran;
- Dinamika pelaksanaan kegiatan operasional.

Sebagai tindak lanjut, Direktorat KPLP melakukan upaya:

- Peningkatan kualitas perencanaan anggaran berbasis kinerja;
- Penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran;
- Optimalisasi penggunaan anggaran sesuai prioritas kegiatan;
- Peningkatan koordinasi antar unit kerja.



Tabel 2.15 Pagu dan Realisasi Per Kegiatan

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN & Umum	977.240.000	960.766.700	98,31%
Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut	62.088.086.000	62.087.126.003	100,00%
Penunjang Teknis Transportasi Laut	9.708.833.000	9.708.700.448	100,00%

VI. Bagian Perencanaan

A. Program Kerja

1. Penyusunan dan Koordinasi Bahan Kebijakan Pimpinan dalam rangka Kegiatan Konsinyering Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Eselon II Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Penyusunan dan Koordinasi Bahan Kebijakan Pimpinan dalam rangka Kegiatan Konsinyering Penetapan dan Tindak Lanjut Hasil Pra Studi Kelayakan (Pra FS) Pembangunan Pelabuhan Laut Tahun 2024 dan Pembahasan Revisi Pedoman Teknis Penyusunan Pra Studi Kelayakan (Preliminary Feasibility Study) Pembangunan Pelabuhan Laut;
3. Penyusunan dan Koordinasi Bahan Kebijakan Pimpinan dalam rangka Konsinyering Pendampingan Intensif kepada Unit Pelaksana Teknis yang Belum Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
4. Penyusunan dan Koordinasi Bahan Kebijakan Pimpinan dalam rangka Kegiatan Konsinyering Sinkronisasi Format Penyusunan Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025;
5. Penyusunan dan Koordinasi Bahan Kebijakan Pimpinan dalam rangka Melaksanakan Kegiatan Konsinyering Finalisasi Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Eselon I Tahun 2025 Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
6. Penyusunan dan Koordinasi Bahan Kebijakan Pimpinan dalam rangka Konsinyering Penyelarasan Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025 – 2029 dan Persiapan



Penyusunan Rencana Strategis Unit Kerja Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025 – 2029;

7. Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Usulan Program/ Kegiatan dalam rangka Persiapan Penyusunan Pagu Kebutuhan/ Pra Pagu Kebutuhan Program Konektivitas dan Layanan Transportasi Laut Tahun Anggaran 2026;
8. Melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (Renja) K/L dalam rangka Penyusunan Data Dukung Daftar Isian Pengusulan Proyek (DIPP) dan Dokumen Studi Kelayakan Proyek (DSKP) usulan kegiatan SBSN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2026;
9. Monitoring Pelaksanaan Program/ Kegiatan Strategis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam rangka Penajaman Dan Optimalisasi Data Capaian Yang Masuk Dalam Pemantauan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Dan Kementerian Perhubungan (E-Monev PP 39/2006, Monev-Kemenkeu / SMART DJA, Dan E-Monitoring) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024;
10. Updating Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam rangka Konsinyering Finalisasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Monitoring Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dan E-Performance Tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dan Eselon II Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024;
11. Kegiatan dan Koordinasi Bahan Kebijakan Pimpinan dalam rangka Evaluasi Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024;
12. Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Program/ Kegiatan Strategis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam rangka Sosialisasi Unit Kepatuhan Internal (UKI) Tahun 2025 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
13. Dilaksanakan Kegiatan Sinkronisasi dan Integrasi Perhitungan Tarif Pelabuhan dan Angkutan Penyeberangan dalam rangka Evaluasi atas Penetapan dan Penyesuaian Tarif Layanan pada Satker BLU di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

B. Realisasi Kegiatan

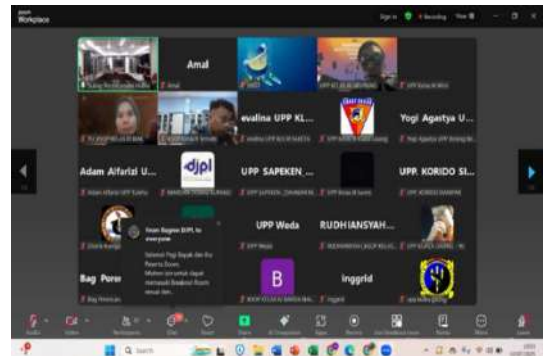
1. Telah dilaksanakan Penyusunan dan Koordinasi Bahan Kebijakan Pimpinan dalam rangka Kegiatan Konsinyering Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Eselon II Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada hari Senin s.d Jumat tanggal 13 s.d. 15 Januari 2025 di Hotel Yuan Garden Pasar Baru, Jakarta dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang.



2. Telah dilaksanakan Penyusunan dan Koordinasi Bahan Kebijakan Pimpinan dalam rangka Kegiatan Konsinyering Penetapan dan Tindak Lanjut Hasil Pra Studi Kelayakan (Pra FS) Pembangunan Pelabuhan Laut Tahun 2024 dan Pembahasan Revisi Pedoman Teknis Penyusunan Pra Studi Kelayakan (Preliminary Feasibility Study) Pembangunan Pelabuhan Laut pada hari Selasa s.d Sabtu tanggal 21 s.d. 25 Januari 2025 di Hotel Bigland Hotel International & Convention Hal, Bogor dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang.



3. Telah dilaksanakan Penyusunan dan Koordinasi Bahan Kebijakan Pimpinan dalam rangka Kegiatan Konsinyering Pendampingan Intensif kepada Unit Pelaksana Teknis yang Belum Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada hari Senin s.d Jumat tanggal 7 s.d. 11 Juli 2025 di Hotel Yuan Garden Pasar Baru, Jakarta dengan jumlah peserta yang hadir secara luring sebanyak 35 orang dan diikuti secara daring oleh 40 Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



4. Telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan dan Koordinasi Bahan Kebijakan Pimpinan dalam rangka Kegiatan Konsinyering Sinkronisasi Format Penyusunan Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Direktorat



Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025 pada hari Senin s.d Jumat, 15 s.d. 19 September 2025 di Hotel Yuan Garden Pasar Baru, Jakarta dengan jumlah peserta sebanyak 35 orang.



5. Telah dilaksanakan Penyusunan dan Koordinasi Bahan Kebijakan Pimpinan dalam rangka Kegiatan Konsinyering Finalisasi Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Eselon I Tahun 2025 Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada hari Selasa s.d Sabtu, 28 Oktober s.d. 1 November 2024 di Hotel Yuan Garden Pasar Baru, Jakarta dengan jumlah peserta hadir secara luring sebanyak 47 orang dan dihadiri seluruh Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut secara daring.



6. Telah dilaksanakan Penyusunan dan Koordinasi Bahan Kebijakan Pimpinan dalam rangka Kegiatan Konsinyering Penyelarasan Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025 – 2029 dan Persiapan Penyusunan Rencana Strategis Unit Kerja Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025 – 2029 pada hari Selasa s.d Jumat tanggal 16 s.d. 19 Desember 2025 di Hotel Novotel Jakarta Gajah Mada, Jakarta dengan jumlah peserta sebanyak 47 orang.



7. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Usulan Program/ Kegiatan dalam rangka Persiapan Penyusunan Pagu Kebutuhan/ Pra Pagu Kebutuhan Program Konektivitas dan Layanan Transportasi Laut Tahun Anggaran 2026 pada hari Senin s.d Sabtu tanggal 13 s.d. 18 Januari 2025 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta dengan jumlah peserta sebanyak 45 orang.



8. Telah dilaksanakan Penyusunan Data Dukung Daftar Isian Pengusulan Proyek (DIPP) dan Dokumen Studi Kelayakan Proyek (DSKP) usulan kegiatan SBSN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2026 yang dibagi dalam 2 (dua) gelombang sebagai berikut:
- Gelombang 1 pada hari Senin s.d Rabu tanggal 20 s.d. 22 Januari 2025 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta dengan jumlah peserta sebanyak 37 orang.
 - Gelombang 2 pada hari Rabu s.d Jumat tanggal 22 s.d. 24 Januari 2025 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta dengan jumlah peserta sebanyak 16 orang





9. Telah dilaksanakan Monitoring Pelaksanaan Program/ Kegiatan Strategis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam rangka Penajaman Dan Optimalisasi Data Capaian Yang Masuk Dalam Pemantauan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Dan Kementerian Perhubungan (E-Monev PP 39/2006, Monev-Kemenkeu / SMART DJA, Dan E-Monitoring) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024 Gelombang I dan II pada hari Selasa s.d Jumat tanggal 7 s.d. 10 Januari 2025 di Hotel Holiday Inn & Suites, Jakarta dengan jumlah peserta sebanyak 302 orang.



10. Telah dilaksanakan Updating Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam rangka Konsinyering Finalisasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Monitoring Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dan E-Performance Tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dan Eselon II Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024 pada hari Senin s.d Jumat tanggal 20 s.d. 24 Januari 2025 di Ibis Styles Jakarta Tanah Abang, Jakarta dengan jumlah peserta sebanyak 48 orang.



11. Telah dilaksanakan Kegiatan dan Koordinasi Bahan Kebijakan Pimpinan dalam rangka Evaluasi Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024 pada hari Senin s.d Jumat tanggal 14 s.d. 18 Juli 2025 di Hotel Yuan Garden, Jakarta dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang.



12. Telah dilaksanakan Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Program/ Kegiatan Strategis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam rangka Sosialisasi Unit Kepatuhan Internal (UKI) Tahun 2025 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada hari Rabu s.d Jumat tanggal 10 s.d. 12 September 2025 di Hotel Ibis Styles, Jakarta dengan jumlah peserta sebanyak 67 orang



13. Telah dilaksanakan Kegiatan Sinkronisasi dan Integrasi Perhitungan Tarif Pelabuhan dan Angkutan Penyeberangan dalam rangka Evaluasi atas Penetapan dan Penyesuaian Tarif Layanan pada Satker BLU di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada hari Senin s.d Jumat tanggal 20 s.d. 24 Oktober 2025 di Hotel Yuan Garden, Jakarta dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang.





VII. Bagian Keuangan

A. Program Kerja

1. Kegiatan Operasional :

- a) Bimtek aplikasi penerbitan Surat Tugas di Lingkungan Kampus Ditjen Hubla;
- b) Bimtek interkoneksi antara aplikasi E katalog versi 6 dengan aplikasi Sakti;
- c) Melaksanakan Kegiatan Monitoring Pengelolaan PNPB Dalam Rangka Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Langkah Strategis Terhadap Sumber Dana PNPB TA. 2025;
- d) Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Wasdal BMN) Semester II TA. 2024;
- e) Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Wasdal BMN) Semester II TA. 2024;
- f) Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2024.

2. Realisasi Program Kerja

a) Kegiatan Operasional

- 1) Telah dilaksanakan bimbingan teknis aplikasi penerbitan Surat Tugas di Lingkungan Kampus Ditjen Hubla



- 2) Telah dilaksanakan bimbingan teknis interkoneksi antara aplikasi E katalog versi 6 dengan aplikasi Sakti



- 3) Telah dilaksanakan kegiatan Kegiatan Monitoring Pengelolaan PNPB Dalam Rangka Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Langkah Strategis



Terhadap Sumber Dana PNBP TA. 2025 pada tanggal 26 s.d 30 Agustus 2025 di Hotel Swissbell Kemayoran Jakarta.



- 4) Telah dilaksanakan Kegiatan Evaluasi Dalam Rangka Pemutakhiran Data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Semester II TA. 2024 diLingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 6 s.d 20 Januari 2025 di Hotel Novotel Gajahmada Jakarta



- 5) Telah dilaksanakan Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Wasdal BMN) Semester II TA. 2024 pada tanggal 14 Januari s.d. 26 Januari 2025 di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta yang diikuti oleh seluruh unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



- 6) Telah dilaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2024 Gelombang 1 (13 s.d. 16 Januari 2025), Gelombang 2 (16 s.d. 19 Januari 2025), Gelombanh 3 (20 s.d. 23 Januari 2025), dan Gelombang 4 (23 s.d. 26 Januari 2025) di Hotel Grand Mercure



Harmoni, Jakarta yang diikuti oleh seluruh unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



B. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 *Audited*. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp5,000,000,- dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,-. Hal ini disebabkan karena sudah tidak adanya Bendahara Penerima pada satuan kerja Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut sehingga mengakibatkan peralihan kelola PNPB kepada Bendahara Penerima satuan kerja Direktorat di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut. Realisasi Belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp266,846,228,771,- atau mencapai 99,52 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp268,506,658,000,-

C. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025 *Audited*. Nilai Aset per 31 Desember 2025 *Audited* dicatat dan disajikan sebesar Rp2,296,333,789,252 yang terdiri dari :

1. Aset Lancar sebesar Rp34,895,567,283,- ;
2. Aset Tetap (netto) sebesar Rp1,927,500,529,851,- ;
3. Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,- ;
4. Aset Lainnya (neto) sebesar Rp320,648,203,253,-.

Nilai Kewajiban sebesar Rp0,- sedangkan Nilai Ekuitas sebesar Rp2,296,333,789,252,-.

D. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai



dengan 31 Desember 2025 Audited adalah sebesar Rp4,938,327,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp257,619,128,917,- sehingga terdapat Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp(257,614,190,590). Surplus/ (Defisit) Kegiatan Non Operasional dan Surplus/(Defisit) Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp(8,078,131,711),- dan sebesar Rp(265,692,322,301),- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(265,692,322,301),-.

E. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp2,309,161,187,439,- dikurangi Surplus/ (Defisit)-LO sebesar Rp(265,692,322,301) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp(790,189,332),- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp253,655,113,446,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 Audited adalah senilai Rp2,296,333,789,252,-

VIII. Bagian Sumber Daya Manusia

A. Program Kerja

- a) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan;
- b) Verifikasi Penerimaan PPPK;
- c) Kegiatan Pemberkasan dan Pemutakhiran Data PPPK Tahap I;
- d) Pemberkasan Dokumen dan Evaluasi Data PPPK Tahap II dan Paruh Waktu;
- e) Evaluasi dan Pendataan Kebutuhan Diklat Tahap I;
- f) Penyertaan Peserta Diklat Kesyahbandaran Klas B;
- g) Penyertaan Peserta Diklat Pemeriksaan Kecelakaan Kapal;
- h) Penyertaan Peserta Diklat Marine Inspector Type B Angkatan III;
- i) Pemutakhiran Data ASN pada ASN Digital dan Sistem Informasi Kepegawaian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025;
- j) Penyelesaian Disparitas Data Pada Aplikasi SIASN BKN dan Monitoring Pemutakhiran Data Pada Aplikasi SIK Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025;
- k) Ujian Dinas Tingkat I;
- l) Kegiatan Mendampingi Peserta Penyuluhan Persiapan Pensiun (Purna Bhakti) Tahun 2025;
- m) Pemberian Piagam Penghargaan Satya Lencana Karya Satya Penyusunan Program Kerja Dan Perencanaan Kegiatan Pada Bagian Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Pemilahan Piagam Dan Petikan Penghargaan Satyalencana Karya Satya XXX, XX dan X Tahun 2025;
- n) Proses Penginputan E-Lapkin Kegiatan Pengelolaan dan Penilaian Kinerja Tahunan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024 Pada Aplikasi E-Kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
- o) Pemeriksaan dan Penanganan Disiplin Pegawai;



- p) Monitoring dan Evaluasi Pelaporan LHKPN Dan LHKASN Tahun 2025 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- q) Kegiatan Pra Assessment Pejabat Struktural dan Non Struktural Melalui Digital Profiling (DIPRO);
- r) Kegiatan Pemetaan Potensi dan Kompetensi/Assessment;
- s) Penyusunan/Pembahasan Pola Mutasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- t) Inventarisasi Dan Validasi Data Dalam Rangka Evaluasi Mutasi Pindah Tugas Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- u) Penyusunan dan perencanaan kegiatan pada Bagian Sumber Daya Manusia dalam rangka penyusunan dan penelaahan naskah soal seleksi pra-asesmen Digital Profiling Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025;
- v) Program Kerja Kegiatan Penyusunan Program Kerja dan Perencanaan Kegiatan Pada Bagian Sumber Daya Manusia dalam rangka Inventarisasi dan Validasi Data Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- w) Penyusunan Program Kerja dan Perencanaan kegiatan pada Bagian Sumber Daya Manusia dalam Rangka Evaluasi Proses Kenaikan Pangkat Periode 1 April 2025 dan 1 Juni 2025 terkait Kenaikan Pangkat Otomatis, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- x) Peningkatkan pemahaman dan konsistensi pelaksanaan kebijakan terkait kenaikan pangkat, pengangkatan, pemberhentian, serta perhitungan angka kredit jabatan fungsional, Biro SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan menyelenggarakan kegiatan pembekalan dan evaluasi

B. Realisasi Program Kerja

- a) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
 - 1) Telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan Pengisian Kompetensi Pendidikan dan Pelatihan pada Rancangan Dokumen Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) bidang operator sebanyak 22 Jabatan pada tanggal 20 s.d 23 Januari 2025 di Hotel Big Land, Bogor (Jawa Barat)



- a) Telah dilaksanakan kegiatan Pengisian Kompetensi Rumpun Ilmu pada Rancangan Dokumen Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) bidang Klerek sebanyak 10 jabatan dan kegiatan tersebut diselenggarakan pada tanggal 14 s.d 17 Mei 2025 di Hotel Orchardz Industri Jakarta



b) Verifikasi Penerimaan PPPK

Telah dilaksanakan kegiatan Verifikasi dan Supervisi PPPK Tahap 2. Jumlah kelulusan administrasi sebanyak 679 orang yang dilaksanakan di Hotel Arch Hotel Bogor (Jawa Barat) pada tanggal 24 sd 26 Januari 2025



c) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Tahap II Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024 yang dimonitoring Bagian SDM dilaksanakan di 6 lokasi yaitu :

1. Gedung Kristian Center Ambon (Maluku) pada tanggal 4 sd 6 Mei 2025;
2. UPT BKN Balikpapan (Kalimantan Timur) pada tanggal 22 sd 24 April 2025;
3. Golden View Batam (Kep. Riau) pada tanggal 4 sd 6 Mei 2025
4. UPT BKN Pontianak (Kalimantan Barat) pada tanggal 22 sd 25 April 2025
5. Kanreg BKN VII Palembang (Sumatera Selatan) pada tanggal 21 sd 23 April 2025
6. Kanreg V BKN Ciracas (DKI. Jakarta) pada tanggal 29 April 2025 sd 1 Mei 2025





d) Evaluasi dan Pendataan Kebutuhan Diklat Tahap I

Telah dilaksanakan Kegiatan Evaluasi dan Pendataan Kebutuhan Diklat Tahap I dilaksanakan pada tanggal 10 s.d 13 September 2025 bertempat di Big Land Hotel The 101 Tegallega, Kota Bogor, Jawa Barat.



IX. Bagian Hukum dan Kerja Sama

A. Program Kegiatan

1. Bantuan Hukum dan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama Konsesi dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP);
3. Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan BMN di Lingkungan Ditjen Hubla;
4. Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama dengan Instansi Terkait;
5. Pembahasan Terkait Proses Pengurusan Penerbitan Hak atas Tanah (HPL dan HGB) Pada Area Konsesi;
6. Partisipasi aktif pada Ship Reporting System di Selat Malaka dan Selat Singapura (STRAITREP at SOMS);
7. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Naskah Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama;
8. Penyelenggaraan Sidang Multilateral, Regional dan Bilateral dan Pertemuan Bilateral Bidang Maritim;
9. Turut berperan aktif dalam pembahasan isu-isu global pada organisasi *International Maritime Organization* (IMO) terkait keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, digitalisasi sektor pelayaran, *Marine Autonomous Surface Ship* (MASS) dan dekarbonisasi melalui *Net Zero Framework* (NZF).
10. Pencalonan Indonesia Sebagai Anggota Dewan IMO periode 2028-2029

B. Realisasi Kegiatan

1. Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai



berikut :

Tabel 2.16 Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Penyelesaian Perkara

No	Nomor Perkara	Para Pihak	Isu Utama Permasalahan	Status Perkara
1	21/G/2024/PTUN.PDG	TKBM KOPERBAM (Chandra Penggugat I, Nursal Uce Penggugat II, Abu Zamar Penggugat III) Kepala KSOP Teluk Bayur (Tergugat I) Kadis Koperasi dan UKM Kota Padang (Tergugat II) Kadisnaker dan Transmigrasi Kota Padang (Tergugat III) Kadisnaker Prov Sumbar (Tergugat IV) Kadis Koperasi dan PKM Prov Sumbar (Tergugat V)	Para tergugat dianggap telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dengan mengeluarkan Rekomendasi Pertimbangan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Teluk Bayur	Sudah ada Putusan Banding dari PTUN Sumatera Utara yang menguatkan Putusan PTUN Padang
2	75/Pdt.G/2024/PN Trg	Bacotang DKK (Para Penggugat) PT Bintang Kartika Segara DKK (Para Tergugat) Menhub (Tergugat XVI) KSOP Kelas I Samarinda (Tergugat XXVI) INSA (Turut Tergugat)	Kegiatan usaha Para Penggugat di perairan Muara Berau Kecamatan Muara Badak telah dilakukan sejak tahun 1960, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun kegiatan tsb mulai menghadapi persoalan sejak adanya kegiatan alih muat barang (STS Transfer) batubara yang dilakukan oleh Tergugat I sampai Tergugat X.	November 2025 Penyampaian Daftar Bukti
3	82/Pdt.G/2021/PN Bpp	Ibrahim Direktur Utama PT Kharisma Jala Mandiri (Pemohon PK) Kepala KUPP Kelas III Rembang (Termohon PK IV)	Permohonan PK terhadap putusan Judex Factie - Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 82/Pdt.G/2021/PN Bpp tanggal 10 November 2022 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 8/PDT/2023/PT SMR tanggal 6 Febuari 2023 Jo Putusan Judex Jurist Mahkamah Agung RI Nomor: 3870K/Pdt/2023 tanggal 14 Desember 2023	24 April 2025 pengajuan Kontra Memori Peninjauan Kembali
4	16/Pdt.G/2025/PN.Sos	1. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Tergugat I);	1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait penguasaan sebagian tanah (seluas ± 38.285,96	Desember 2025 Kesimpulan



No	Nomor Perkara	Para Pihak	Isu Utama Permasalahan	Status Perkara
		2. Menteri Perhubungan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Perhubungan Laut c.q. Kantor UPP Kelas III Soasio (Tergugat II); 3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia c.q. Ditjen Perhubungan Laut c.q. Kantor UPP Kelas III Sofifi (Tergugat III); 4. Aminah Muhammad (Tergugat IV).	m ²) yang merupakan bagian dari tanah eks-Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 01/HGB/1985 2. Bahwa dasar hak yang diklaim oleh Penggugat, yaitu HGB No. 01/HGB/1985, telah berakhir jangka waktunya pada tanggal 12 Juli 2005. Penggugat, karena kelalaiannya sendiri, tidak pernah mengajukan permohonan perpanjangan hak kepada Kantor Pertanahan	

2. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Naskah Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama selama Tahun 2025 terdapat 18 (delapan belas) perjanjian yang telah ditandatangani. Adapun perjanjian dimaksud adalah sebagai berikut

Tabel 2.17 Penyusunan Naskah Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama

NO	NOMOR PERJANJIAN	JUDUL PERJANJIAN	PARA PIHAK
1	HK.201/2/23/DJPL/2025 PJ.01/12/2/3/DGKP/UTMA/PLND-25 Tanggal 12 Februari 2025	Penyelenggaraan Pelayanan di Bidang Pelayaran	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
2	HK. 201/4/20/DJPL/2023 B.09111/HK.503/KI-23 Tanggal 12 Februari 2025	Adendum Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Survei dan Sertifikasi Statutoria Kapal Berbendera Indonesia	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT BKI (Persero)
3	HK.201/01/09/KSOP.KBBL-2025 025/DSP-EXT/III/2025 tanggal 14 Maret 2025	Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Setangga pada Pelabuhan Kota Baru	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kotabaru – Batulicin Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT Dua Samudera Perkasa



NO	NOMOR PERJANJIAN	JUDUL PERJANJIAN	PARA PIHAK
4	PL.001/1/1/KSOP-AMB.2025 PP.01/3/3/2/B2.2/GM/AMBN-25 tanggal 27 Maret 2025	Sewa Barang Milik Negara (BMN) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Ambon berupa Bangunan Dermaga di Pelabuhan Ambon	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Ambon Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
5	HK.201/1/1/KSOP.Satui-2025 014/PBR- DIR/V/2025 Tanggal 15 Mei 2025	Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Pelabuhan Buana Reja di Pelabuhan Satui	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Satui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT Pelabuhan Buana Reja
6	000.2.3.2/4729 HK.201/6/20/DJPL/2025 Tanggal 20 Juni 2025	Naskah Perjanjian Hibah Daerah Berpa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah	Pemprov Sulawesi Tenggara dengan Ditjen Hubla Kemenhub
7	AL.301/34/5/UPP.SKG/2025 88/PKS-WTDP/VII/Dok.25 Tanggal 11 Juli 2025	Perjanjian Konsesi tentang Pengusahaan Pada Wilayah Tertentu di Perairan Yang Befungsi Sebagai Pelabuhan di Perairan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur	Kantor UPP Kelas I Sangkulirang Ditjen Hubla Kemehub dengan PT Biru Arnawama Timur
8	Adendum Kedua HK.201/4/20/DJPL/2023 B.09111/HK/503/KI-23 Tanggal 11 Juli 2025	Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Survei dan Sertifikasi Statutoria Kapal Berbendera Indonesia	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT Biro Klasifikasi Indonesia (persero)
9	HK.201/1/1/UPP.PML/2025 2.54/PKS/DSP/LGL/7/2025/Port.Bombana Tanggal 11 Juli 2025	Perjanjian Konsesi tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan oleh PT Dua Samudera Perkasa di Pelabuhan Paria Provinsi Sulawesi Tenggara	Kantor UPP Kelas III Pomalaa Ditjen Hubla kemehub dengan PT Dua Samudera Perkasa
10	27/7/DPU/P/B HK.201/7/25/DJPL/2025 Tanggal 15 Agustus 2025	Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama dan Koordinasi dalam Rangka Distribusi Uang Rupiah Dengan Moda Angkutan di Perairan	Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
11	HK.201/9/13/DJPL/2025 018/S-kel/TNT/IX/2025 Tanggal 11 September 2025	Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Pada Kantor UPP Kelas III Belang-Belang Ditjen Hubla Kemenhub	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kemehub dengan PT Transporindo Nusantara Terminal



NO	NOMOR PERJANJIAN	JUDUL PERJANJIAN	PARA PIHAK
12	HK.201/9/12/DJPL/2025 017/S-ke/INT/IX/2025 Tanggal 11 September 2025	Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Pada Kantor UPP Kelas II Nabire Ditjen Hubla Kemenhub	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kemenhub dengan PT Transporindo Nusantara Terminal
13	HK.201/9/19/DJPL/2025 Hm.03/KB.71-KSD/2025 Tanggal 30 September 2025	Kesepakatan Bersama tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Bidang Pelayaran di Pelabuhan Patimban	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kemenhub dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang
14	PJ-MHB 6 TAHUN 2025 023/NK/OTDA/I/2025 Tanggal 31 Oktober 2025	Nota Kesepakatan tentang Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan	Kementerian Perhubungan dengan Pemprov Sumatera Selatan
13	PJ-MHB 8 TAHUN 2025 024/NK/OTDA/I/2025 Tanggal 31 Oktober 2025	Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi Sumatera Selatan	Kementerian Perhubungan dengan Pemprov Sumatera Selatan
14	500.17/058/MOU/BPKAD/2025 PJ-MHB 10 TAHUN 2025 Tanggal 31 Oktober 2025	Naskah Perjanjian Hibah tentang Hibah Barang Milik Pemprov Sumatera Selatan Berupa Tanah Seluas 599.500M2 Yang Terletak di Tanjung Carat Desa Sungsang I dan Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Kepada Kementerian Perhubungan RI Untuk Lokasi Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru/New Palembang	Pemrov Sumatera Selatan dengan Kementerian Perhubungan RI
15	25 Tahun 2025 HK.201/11/25/DJPL/2025 HM.03.02/26/11/2/PRST/UTMA/PLND-25 Tanggal 26 November 2025	Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Pengembangan Kawasan Pesisir dan Pelabuhan Laut di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Direktorat Jakarta Perhubungan Laut dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
15	KU.204/01/01/KSOP.Lbr/2025 004/MOU/PELTRA/XII/2025 Tanggal 4 Desember 2025	Perjanjian Konsesi tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Pelabuhan Lembar Sejahtera di Pelabuhan Lembar	Kantor KSOP Kelas III Lembar dengan PT Pelabuhan Lembar Sejahtera



NO	NOMOR PERJANJIAN	JUDUL PERJANJIAN	PARA PIHAK
16	HK.201/1/1/KSOP.TG.WI/2025 005/MOU/PELTRA/XII/2025 Tanggal 11 Desember 2025	Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Pada Kantor KSOP Kelas III Tanjung Wangi Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan	Kantor KSOP Kelas III Tanjung Wangi dengan PT Pelabuhan Lembar Sejahtera
17	06/DJID.4/SP.02.04/12/2025 HK.201/12/8/DJPL/2025 Tanggal 18 Desember 2025	Sinergitas Interkoneksi Sistem Layanan Perizinan di Bidang Maritim	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kemenkodigi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub
18	HK.201/2/12/KSOP.KBBL-2025 16.226/ADM/DSP/LGL/12/2025/STS.TJP Tanggal 19 Desember 2025	Adendum Perjanjian Konsesi tentang Pengusahaan Pada Wilayah Tertentu di Perairan Yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan di Perairan Tanjung Pemancingan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan	Kantor KSOP Kelas II Kotabaru-Batulicin dengan PT Dua Samudera Perkasa

3. Pembahasan Terkait Proses Pengurusan Penerbitan Hak atas Tanah (HPL dan HGB) Pada Area Konsesi :

Kegiatan Pembahasan Terkait Proses Pengurusan Penerbitan Hak atas Tanah (HPL dan HGB) Pada Area Konsesi dilaksanakan pada tanggal 5 November 2025. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Bagian Hukum dan Kerja Sama dengan melibatkan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, Direktorat Kepelabuhanan dan Direktorat Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian ATR/BPN sebagai Narasumber dan perwakilan dari 19 (sembilan belas) Penyelenggara Pelabuhan sebagai peserta.

Latar belakang pelaksanaan kegiatan tersebut adalah dikarenakan di dalam Perjanjian Konsesi terdapat klausul Hak atas Tanah dan Aset dalam Perjanjian Konsesi terdapat proses penerbitan Sertipikat HPL yang dimohonkan oleh Penyelenggara Pelabuhan serta penerbitan HGB yang dimohonkan BUP di atas HPL Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Perhubungan. Bahwa terhadap proses penerbitan sertipikat HPL dimaksud terdapat jangka waktu penyelesaian yang tertuang di dalam Perjanjian Konsesi, maka dipandang perlu untuk dilakukan evaluasi terhadap progres penerbitan Sertipikat HPL sebagaimana terlampir pada tabel dibawah ini.



Tabel 2.18 Inventarisasi Proses Pengurusan Hak Pengelolaan Atas Perjanjian Konsesi

No	Perjanjian Konsesi	Jangka Waktu Konsesi & Jangka Waktu Pengurusan Hpl	Luasan Area Konsesi	Keterangan
1	➤ KSOP Kelas II Marunda dengan BUP PT Karya Citra Nusantara Tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan PAda Terminal Umum PT Karya Citra Nusantara di Pelabuhan Marunda HK.107/1/9/KSOP.Mrd-16 001/KCN-KSOP/Konsesi/XI/2016 Tanggal 29 November 2016 ➤ Adendum I Tanggal 20 Agustus 2024	➤ 70 Tahun ➤ Pengurusan HPL 2 Tahun Setelah Penandatanganan Perjanjian Konsesi ➤ Terdapat perubahan Pengurusan HPL tidak ada jangka waktu	± 111 Ha	Perjanjian Konsesi 2016 dan addendum 2024, Sampai saat ini belum berjalan lancar. Sudah ada surat permohonan ke Kantah 2025 tapi terkendala dengan izin reklamasi yang diminta Kantah. Sampai saat ini belum ada tindaklanjut dari Kantah.
2	➤ Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Marunda dengan BUP PT Pelabuhan Tegar Indonesia Tentang Kegiatan Pengusahaan di Bidang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Umum di Terminal Marunda Center, Pelabuhan Marunda HK.107/1/2/KSOP.Mrd-17 008/PTI-DIR/KSOP/V/2017 Tanggal 24 Mei 2017 ➤ Adendum I Tanggal 13 Desember 2019 ➤ Adendum II Tanggal 20 Agustus 2024	➤ 65 Tahun ➤ Pengurusan HPL 2 Tahun sejak Penandatanganan Perjanjian Konsesi ➤ Jangka waktu konsesi menjadi 70 tahun. ➤ Pengurusan HPL paling Lambat 1 Tahun sejak addendum 1 ditandatangani ➤ Pengurusan HPL paling lambat 2 tahun setelah penyelesaian pembangunan fase 2	Fase I 40,000M ² Fase II 51.000M ²	Fase I Sudah ada sertifikat HPL atas nama Kemenhub Tahun 2023. Fase II sedang dalam proses Pembangunan.
3	➤ Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan dengan BUP PT Lestari Samudra Sakti Tentang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Lestari Samudra Sakti HK.201/1/5/KSOP.BPN 2022 049/LSS-KSOP/VIII/2022 Tanggal 30 Agustus 2022	➤ 54 Tahun ➤ Pengurusan HPL 2 tahun setelah penandatanganan Perjanjian Konsesi	39.163 M ²	Belum ada pengurusannya HPL.



No	Perjanjian Konsesi	Jangka Waktu Konsesi & Jangka Waktu Pengurusan Hpl	Luasan Area Konsesi	Keterangan
4	➤ Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan dengan BUP PT Indika Logistic & Support Services Tentang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Indika Logistic & Support Services di Pelabuhan Balikpapan UM.002/17/13/KSOP BPN 2023 026/ILSS/LEG/AGR/III/2023 Tanggal 27 Maret 2023 ➤ Adendum I Tanggal 30 Agustus 2024	➤ 31 Tahun ➤ Pengurusan HPL 2 tahun sejak penandatanganan Perjanjian Konsesi ➤ Perubahan Jangka Waktu menjadi 54 tahun ➤ Pengurusan HPL paling lama 1 tahun sejak selesainya proses pelepasan HGB Awal.	32.880 M ²	Sudah ada akta pelepasan HGB. Proses selanjutnya pengurusan sertipikat HPL. Terdapat kendala di PKKPRlnya.
5	➤ Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda dengan BUP PT Sarana Abadi Lestari Tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Umum PT Sarana Abadi Lestari di Pelabuhan Samarinda AL.302/3/5/KSOP.SMD-2020 K.001/17/6/SPK.AL/2020 Tanggal 17 Juni 2020	➤ 37 Tahun ➤ Pengurusan HPL 2 tahun sejak penandatanganan Perjanjian Konsesi	11.450 M ²	Sudah HPL, saat proses pengurusan konstanta untuk penerbitan HGB diatas HPL.
6	➤ Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik dengan BUP PT Berlian Manyar Sejahtera Tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Terminal Manyar di Pelabuhan Gresik HK.107/01/10/Ksop.Gsk-2017 02.00/SPKS/BMS-KSOP/XII/2017 Tanggal 15 Desember 2017	➤ 76 Tahun ➤ Paling Lambat Pengurusan HPL Pada Tahun Ke 1 (Satu) Sejak Penandatanganan Perjanjian Konsesi	350 Ha	Untuk luasan 112 Ha telah bersertipikat HPL, sisanya masih dalam pengerjaan reklamasi.
7	➤ Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik dengan BUP PT Siam Maspion Terminal Tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Siam Maspion di Pelabuhan Gresik AL.301/02/19/KSOP.Gsk-	➤ 43 Tahun Menjadi 55 Tahun ➤ Pengurusan HPL 2 tahun sejak penandatanganan Perjanjian Konsesi ➤ Pengurusan HPL 2 tahun Adendum	17.304 M ²	Sertipikat HPL sudah terbit, saat ini sedang proses pengurusan HGB.



No	Perjanjian Konsesi	Jangka Waktu Konsesi & Jangka Waktu Pengurusan Hpl	Luasan Area Konsesi	Keterangan
	2020PK.001/SMT-KSOP/VIII/2020 Tanggal 8 Agustus 2020 ➤ Adendum Pertama AL302/01/04/KSOP.GSK2023 002/SMT-KSOP/PK/II/2023 Tanggal 6 Januari 2023 ➤ Adendum Kedua HK.201/1/6/KSOP.GSK-2024 04/PB/KSOP GSK-SMT/GEN/VII/2024 Tanggal 15 Juli 2024	Pertama ditandatangani. ➤ Pengurusan HPL 2 tahun Adendum Kedua ditandatangani.		
8	➤ Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik dengan BUP PT Pelabuhan Indonesia Maspion Tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Peti Kemas Pelabuhan Indonesia Maspion di Pelabuhan Gresik AL.302/04/14/KSOP.GSK-2023 60/PIM-KSOP/X/2023 Tanggal 2 Oktober 2023	➤ 71 Tahun ➤ Pengurusan HPL 60 hari sejak selesainya pekerjaan reklamasi yang dituangkan dalam Berita Acara.	Luas Area Konsesi ±91,42 Ha	Sudah terbit sertipikat HPL atas nama Kemenhub.
9	➤ Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak dengan BUP PT Indo Kontainer Sarana Tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Multipurpose PT. Indo Kontainer Sarana di Pelabuhan Pontianak PP.008/1/6/KSOP.PTK-18 007/IKS/III/2018 Tanggal 14 Maret 2018 ➤ Adendum I Tanggal 9 September 2024	➤ 61 Tahun ➤ Pengurusan HPL 2 Tahun sejak penandatanganan Perjanjian Konsesi ➤ Perubahan jangka waktu menjadi 56 tahun ➤ Pengurusan HPL 1 Tahun sejak Adendum I	Luas wilayah konsesi 10.228 M ²	HPL masih berproses di Kantah namun terdapat kekurangan legalitas.
10	➤ Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Ranga Ilung dengan BUP PT Bangun Nusantara Jaya Makmur Perkasa Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Bangun Nusantara Jaya Makmur Perkasa HK.701/86/VII/UPP.RI-2022	➤ 15 Tahun ➤ Pengurusan HPL 2 Tahun sejak penandatanganan Perjanjian Konsesi	148.310 M ²	Saat ini sudah ada akta pelepasan HGB Okt 2024, namun belum dilakukan pengurusan HPL.



No	Perjanjian Konsesi	Jangka Waktu Konsesi & Jangka Waktu Pengurusan Hpl	Luasan Area Konsesi	Keterangan
	001/BNJMP-KUPPRI/IV/2022 Tanggal 13 Juli 2022			
11	➤ Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Probolinggo dengan BUP PT Delta Artha Bahari Nusantara Tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Umum PT. Delta Artha Bahari Nusantara di Pelabuhan Probolinggo PP.002/1/17/KSOP-Pbl-17 DIR.005/DABN/PERJ/XII/2017 Tanggal 21 Februari 2017.	➤ 64 Tahun ➤ Pengurusan HPL 1 Tahun sejak penandatanganan Perjanjian Konsesi	± 60 Ha (Sebagian yg sudah HPL)	HPL sudah terbit 24,4. KSP 8,9 Ha, HPL Kendala, yg bangun pemprov jadi terkendala dana.
12	➤ Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Pakis dengan PT Lamongan Integrated Shorebase Tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Umum Tanjung Pakis di Pelabuhan Brondong HK.201/1/14/UPP.BRG-2020 045/LIS-DIR/G/VII/2020 Tanggal 25 Juli 2020 ➤ Adendum Ke 1 Tanggal 22 Desember 2022	➤ 72 Tahun ➤ Pengurusan HPL untuk lahan yang telah direklamasi 2 Tahun sejak penandatanganan Perjanjian Konsesi ➤ Pengurusan HPL untuk lahan yang telah direklamasi 4 Tahun sejak penandatanganan perjanjian konsesi ➤ Pengurusan HPL untuk lahan yang akan direklamasi 2 tahun setelah dilaksanakan reklamasi.	33,73 Ha (28 Hasil reklamasi, dan 4 Ha yg sudah HPL atas nama PT LIS)	Sudah mengurus pelepasan HPL atas nama PT LIS seluas 4 Ha. PT. LIS adalah BUMD. Kabag Hkm: Pemendagri 118 Tahun 2018. BUMD tidak boleh menyerahkan Aset ke pihak lain. Dikonsultasikan dengan PT. LIS dan Pemdanya, agar tidak terulang seperti DABN.
13	➤ Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Satui dengan PT Bina Indo Raya Tentang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhan di Terminal Bina Indo Raya HK.201/1/1/UPP.Satui-2022 008/PST/BIR-KUPP/IV/2022 Tanggal 12 April 2022	➤ 25 Tahun ➤ Pengurusan HPL 2 Tahun sejak penandatanganan	87.910 M ²	
14	➤ Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Satui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan BUP PT Pelabuhan Buana Reja	➤ 28 Tahun ➤ Pengurusan HPL 6 bulan setelah HGB awal dilepaskan dan	186.756 M ²	Apakah pelepasan HGB awal sudah dilakukan? Sudah



No	Perjanjian Konsesi	Jangka Waktu Konsesi & Jangka Waktu Pengurusan Hpl	Luasan Area Konsesi	Keterangan
	Tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Pelabuhan Buana Reja di Pelabuhan Satui HK.201/1/1/KSOP.Satui-2025 014/PBR-DIR/V/2025 Tanggal 15 Mei 2025	adanya surat pemberitahuan ke KSOP.		dilaporkan/belum ke KSOP?
15	➤ Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kotabaru - Batulicin dengan BUP PT Pelabuhan Swangi Indah Tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Umum PT Pelabuhan Swangi Indah di Pelabuhan Kotabaru – Batulicin KL.003/01/14KSOP.KBBL-19 002.a/PPELSWIN-KPB/IX-19 Tanggal 4 Oktober 2019	➤ 21 Tahun ➤ Pengurusan HPL 2 Tahun sejak penandatanganan Perjanjian Konsesi		Akta pelepasan HGB sudah ada, saat ini berproses pengurusan HPL di Kantah.
16	➤ Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomalaa Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan BUP PT Dua Samudera Perkasa Tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Oleh PT Dua Samudera Perkasa di Pelabuhan Paria Provinsi Sulawesi Tenggara HK.201/1/1/UPP.PML/2025 2.54/PKS/DSP/LGL/7/2025/Port .Bombana Tanggal 11 Juli 2025	➤ 49 Tahun ➤ Pengurusan HPL 2 tahun setelah penandatanganan Perjanjian Konsesi	23 Ha	Masih dalam proses pengurusan HPL dan lahan ini adalah lahan reklamasi.
17	➤ Kantor UPP Kelas II Tana Paser dengan BUP PT Rugaya Nusantara Jaya Tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Rugaya Nusantara Jaya di Pelabuhan Tana Paser HK.201/1/9/UPP.TPR-2024 021/RNJ-BPP/PK/XI/2024 Tanggal 6 November 2024	➤ 31 Tahun ➤ Pengurusan HPL 2 tahun setelah penandatanganan Perjanjian Konsesi	97.330 M ²	Masih proses pengurusan pelepasan Hak Pakai sebanyak 4 bidang dan 1 bidang masih bersertipikat HGB.
18	➤ Kantor KSOP Kelas III Talang Duku dengan BUP PT Wahyu Samudra Indah Tentang Kegiatan Pengusahaan Kepelabuhanan Pada Terminal	➤ 66 Tahun ➤ Pengurusan HPL 1 tahun setelah penandatanganan Perjanjian Konsesi	11,69 Ha	Saat ini BUP belum melakukan pelepasan HGB dari BUP.



No	Perjanjian Konsesi	Jangka Waktu Konsesi & Jangka Waktu Pengurusan Hpl	Luasan Area Konsesi	Keterangan
	Peti Kemas Muaro Jambi di Pelabuhan Talang Duku AL.001/1/1/KSOP.TLD-2024 WSI-2024.9.98 Tanggal 5 September 2024			
19	➤ Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Teluk Palu dengan BUP PT Samas Port Tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Samas Port di Pelabuhan Teluk Palu HK.201/1/03/KSOP.Tlk.Palu-2024 002/S.port/DIR/X/2024 Tanggal 18 Oktober 2024	➤ 30 Tahun ➤ Pengurusan HPL 6 bulan setelah HGB awal dilepaskan dan adanya surat pemberitahuan ke KSOP	16.637 M ²	Masih proses Adendum, karena ada lahan yang digunakan namun tidak masuk dalam area perjanjian konsesi.
20	➤ Kantor UPP Kelas II Weda dengan BUP PT Pelabuhan Samudera Nusantara Tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Pelabuhan Samudera Nusantara di Pelabuhan Weda AL.308/2/9/UPP.WED-24 001/PKS/PSN-KUPPIIWeda/X/2024 Tanggal 14 Oktober 2024	➤ 38 Tahun ➤ Pengurusan HPL 2 tahun setelah penandatanganan Perjanjian Konsesi	35.432 M ²	Sudah ada akta pelepasan HGB dan baru akan berproses untuk pengurusan HPL.
21	➤ Kantor UPP Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Weda dengan BUP PT Weda Bay Port Tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan Lelilef AL.308/1/22/UPP.WED/2024 WBP-24222 Tanggal 6 Agustus 2024	➤ 40 Tahun ➤ Pengurusan HPL 2 tahun setelah penandatanganan Perjanjian Konsesi	42.000 M ²	Sudah ada akta pelepasan HGB dan baru akan berproses untuk pengurusan HPL.
22	➤ Kantor UPP Kelas III Kolonedale Ditjen Hubla dengan PT Satya Amerta Havenport Tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Satya Amerta Havenport di Pelabuhan Kolonedale AL.001/189/13/UPP.KDL-2024 001/SAH-DirjenHubla/X/2024 Tanggal 18 Oktober 2024	➤ 35 tahun ➤ Pengurusan HPL 6 bulan setelah HGB awal dilepaskan dan adanya surat pemberitahuan ke UPP	76.420 M ²	Roya sudah terbit dan akan dilakukan Pelepasan HGB serta pengurusan HPL.



No	Perjanjian Konsesi	Jangka Waktu Konsesi & Jangka Waktu Pengurusan Hpl	Luasan Area Konsesi	Keterangan
23	➤ Kantor KSOP Kelas I Banjarmasin dengan BUP PT Pelabuhan Talenta Bumi Tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Di Terminal Pelabuhan Talenta Bumi di Pelabuhan Banjarmasin HK.201/01/20/KSOP.BJM-2025 001/ADM-PTB/VIII/2025 Tanggal 5 Agustus 2025	➤ 27 Tahun ➤ Pengurusan HPL 6 bulan setelah HGB awal dilepaskan dan adanya surat pemberitahuan ke KSOP	292.486 M ²	Sudah berkoordinasi dengan BUP dan Kantah untuk pelepasan HGB.
24	➤ Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten dengan BUP PT Batu Alam Makmur Tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Batu Alam Makmur 107/1/5/KSOP-BTN-2022 003/BAM-KSOP/PK/IV/2022 Tanggal 21 April 2022	➤ 16 Tahun ➤ Pengurusan HPL 2 tahun setelah penandatanganan Perjanjian Konsesi	11.450 M ²	Sudah terbit HPL No. 176 Tahun 2023 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Perhubungan HGB No. 105 Tahun 2024 atas nama PT Batu Alam Makmur
25	➤ Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten dengan BUP PT Bandar Bakau Jaya Tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Bandar Bakau Jaya di Pelabuhan Banten HK.107/2/6/KSOP.Btn-2020 004/BBJ/VII/2020 Tanggal 23 Juli 2020	➤ 73 Tahun ➤ Pengurusan HPL 2 tahun setelah penandatanganan Perjanjian Konsesi	60.000 M ²	Sudah terbit HPL No. 165 Tahun 2023 atas nama Pemerintah Kabupaten Serang Cq. Kementerian Perhubungan HGB No. 00117 Tahun 2024 atas nama PT Bandar Bakau Jaya
26	➤ Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kelas I Banten dengan BUP PT. Krakatau Bandar Samudera Tentang Kegiatan pengusahaan dibidang penyediaan dan / atau pelayanan jasa kepelabuhanan di terminal cigading HK.107/2/2/KSOP.BTn-16 HK.02.01/052.01.DU/XI/2016 Tanggal 14 November 2016 ➤ Adendum Ke 5 tanggal 21 Maret 2024	➤ 75 Tahun ➤ Melakukan Pengurusan pelepasan HPL atas tanah di Area Konsesi kepada Negara 1 tahun setelah penandatanganan addendum ke 5	Lokasi 1 seluas 65.734 M ² Lokasi 2 seluas 6.334 M ² Lokasi 3 seluas 77.672 M ²	Lokasi 1 sudah terbit sertipikat HPL atas nama Kementerian Perhubungan dan telah terbit HGB atas nama PT KBS. Lokasi 2 masih dalam proses pengurusan sertipikat HPL di Kemeterian ATR/BPN. Lokasi 3 sudah



No	Perjanjian Konsesi	Jangka Waktu Konsesi & Jangka Waktu Pengurusan Hpl	Luasan Area Konsesi	Keterangan
				terbit sertipikat HPL atas nama Kementerian Perhubungan dan telah terbit sertipikat HGB atas nama PT KBS Lokasi
27	➤ Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kelas I Dumai dengan BUP PT Pelabuhan Mundam Sejahtera Tentang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhan di Terminal Pelabuhan Mundam Sejahtera Pada Pelabuhan Dumai HK.201/1/5/KSOP.Dmi/2024 138/PMS-DMI/SK-IX/2024 Tanggal 27 September 2024	➤ 35 tahun Pengurusan HPL 2 tahun setelah penandatanganan Perjanjian Konsesi	50.000 M ²	Saat ini proses pelepasan HGB.

X. Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat

A. Program Kerja

1. Kegiatan Pemerintahan

- Penataan Organisasi dan Tata Kerja Ditjen Hubla;
- Diseminasi Bidang Kelembagaan;
- Harmonisasi Peta Jabatan dan Uraian Jenis;
- Penataan Bidang Ketatalaksanaan ;
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- Kajian Implementasi Reformasi Birokrasi;
- Diseminasi Bidang Reformasi Birokrasi.

2. Kegiatan Operasional

- Evaluasi Ringkasan dan Analisa Berita;
- Pembuatan Profil Video Ditjen Hubla;
- Dokumentasi Foto Dan Video;
- Penyelenggaraan Pameran/Visualisasi;
- Pemasangan *Advertorial* dan *Inforial*;
- Penerbitan *News Letter* Ditjen Hubla;
- Media Relation* Ditjen Hubla;
- Liputan Sidang Internasional;
- Publikasi Pembangunan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Di Media Cetak Dan Elektronik;



- j. Bimbingan Teknis Kehumasan Ditjen Hubla;
- k. Iklan Layanan Masyarakat;
- l. Kampanye Keselamatan Pelayaran;
- m. Jumpa Pers/Siaran Pers;
- n. Peliputan Dan Pemantauan Opini Publik Pelayanan Angkutan Laut;
- o. Liputan Khusus Pembangunan Sarana Dan Prasarana Ditjen Hubla;
- p. Bimbingan Teknis Tim Media Sosial Ditjen Hubla;
- q. Penyelenggaraan Press Tour Ditjen Hubla;
- r. Monitoring PPID;
- s. Penyelenggaraan Talkshow/Dialog Interaktif di Televisi;
- t. Workshop Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Hubla;
- u. Penyusunan Booklet, Spanduk Dan Banner.

B. Realisasi Program Kerja

1. Telah dilaksanakan kegiatan Serah Terima Rekomendasi dan Penyusunan Program Tindak Lanjut Penataan Organisasi dan Tata Kerja KSOP dan UPP pada Tanggal 3 s.d 4 Maret 2023 di Hotel Pangeran Pekanbaru, Riau yang dihadiri oleh Tim Kedeputan Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPANRB, Perwakilan Biro SDM dan Organisasi, KSOP dan UPP



2. Telah dilaksanakan Rapat Teknis Penyempurnaan Materi Muatan Organisasi dan Tata Kerja pada KSOP Utama, KSOP dan UPP di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Tanggal 7 s.d 10 Maret 2023 di Hotel Harris Vertu Harmoni, Jakarta yang dihadiri oleh peserta baik secara *online* dan *offline*



3. Telah dilaksanakan Diseminasi Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tanggal 7 Juni 2023 dilanjutkan dengan Rapat Teknis Revalidasi Data Laporan Beban Kerja Tahap I di Hotel Redtop & Convention



Center Jakarta Tanggal 7 s.d. 8 Juni 2023 dan Rapat Teknis Revalidasi Data Laporan Beban Kerja Tahap II dan III di Hotel Grand Mercure Yogyakarta Adi Sucipto, Yogyakarta Tanggal 13 s.d. 14 Juni 2023..



4. Telah dilaksanakan Rapat Teknis Penilaian Data Dukung Pengusulan Evaluasi Jabatan Tahap I Tanggal 13 Februari s.d 17 Februari 2023 dan Tahap II Tanggal 20 Februari s.d 24 Februari 2023 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta dalam rangka tindak lanjut Penyempurnaan Peta Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan hasil pelaksanaan penyusunan Data Persediaan dan Kebutuhan Pegawai serta Penilaian Awal Usulan Evaluasi Jabatan



5. Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Duta Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahap I di Hotel Discovery Hotel Ancol Jakarta, Tanggal 6 s.d. 11 November 2023 dan dilaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Duta Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahap II di Citra Cikopo Hotel & Family Cotages Bogor, Jawa Barat, Tanggal 20 s.d. 25 November 2023





6. Penyelenggaraan Pameran/Visualisasi

Pada Tahun 2023, Ditjen Hubla ikut berpartisipasi pada Stand Kementerian Perhubungan pada Pameran *Indonesia Climate Change Expo and Forum (ICCEF)* tahun 2023 yang diselenggarakan di *Grand City Mall & Convex*, Surabaya pada tanggal 6 s.d 9 Juli 2023. *Indonesia Climate Change Expo and Forum (ICCEF)* tahun 2023 diselenggarakan sebagai rangkaian Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2023 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai wahana dalam rangka upaya internalisasi pemahaman tentang lingkungan dan agenda perubahan iklim.



7. Kampanye Keselamatan Pelayaran

Kegiatan Kampanye Keselamatan Pelayaran Tahun 2023 dilaksanakan bersamaan dengan Peringatan Hari Pelaut Sedunia Tahun 2023, pada tanggal 25-26 Juni 2023 di kota Bali. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mensosialisasikan pentingnya keselamatan pelayaran dan mengapresiasi peran dan kontribusi para pelaut dalam perekonomian nasional dan internasional.





BAB III

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Kegiatan Pemberkasan dan Pemutakhiran Data PPPK Tahap I
Telah dilaksanakan Kegiatan Pemberkasan dan pemutakhiran data PPPK Tahap I di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan jumlah Formasi 4.602 dengan rincian sejumlah 3.838 orang yang lulus administrasi, dalam waktu pemberkasan dokumen terdapat 5 orang meninggal dunia, 3 orang mengundurkan diri dan 8 orang di batalkan kelulusannya sehingga PPPK Tahap I berjumlah sebanyak 3.822 orang yang telah terangkat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, kegiatan pemberkasan dan pemutakhiran data tersebut dilaksanakan di Hotel Grand 7 Kemayoran (DKI. Jakarta) pada tanggal 23 sd 26 Juni 2025.
2. Pemberkasan Dokumen dan Evaluasi Data PPPK Tahap II dan Paruh Waktu
Telah dilaksanakan Kegiatan Pemberkasan Dokumen dan Evaluasi Data PPPK Tahap II dan Paruh Waktu di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yaitu :
Rincian untuk PPPK Tahap II berjumlah 679 orang berdasarkan pengumuman PG-STJ 21 Tahun 2025 dengan rincian sejumlah 4 orang yang meninggal dunia/mengundurkan diri/dianggap mengundurkan diri, 3 orang di batalkan kelulusannya sehingga PPPK Tahap II yang terangkat berjumlah sebanyak 672 orang dan untuk PPPK Paruh Waktu berjumlah 1656 orang berdasarkan pengumuman PG-STJ 28 Tahun 2025 dengan rincian sejumlah 2 orang yang meninggal dunia/mengundurkan diri/dianggap mengundurkan diri, 8 orang di batalkan kelulusannya sehingga PPPK Paruh Waktu yang terangkat berjumlah sebanyak 1.646 orang, kegiatan pemberkasan tersebut dilaksanakan di Arch Hotel Bogor (Jawa Barat) pada tanggal 19 sd 22 November 2025.
3. Pemutakhiran Data ASN pada ASN Digital dan Sistem Informasi Kepegawaian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025

Tabel 3.1 Data Disparitas pada SIASN BKN

Disparitas Data pada SIASN BKN posisi 15 Mei 2025			
No	Jenis Disparitas	Jumlah	Tindak Lanjut
1	NIK Belum Valid	291	telah dilakukan verifikasi terhadap pegawai tersebut
2	BUP masih aktif	57	sudah diinformasikan ke pemroses pensiun pegawai
3	Belum kirim SKP 2023	437	telah diteruskan ke admin E-Kinerja untuk segera diproses

Capaian IPASN Tahun 2024 posisi 25 Mei 2025 rata-rata nilai IP ASN 73,74 masuk



kategori sedang dibanding dengan tahun 2023 dengan perolehan IP ASN rata-rata 81,35 masuk kategori tinggi. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memiliki rata-rata nilai IP ASN 72,71 dengan detail sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian IP ASN DJPL

IP ASN DJPL	Rincian	Nilai
72,71 dari 100	Kualifikasi	22,88 dari 25
	Kompetensi	28,21 dari 40
	Kinerja	23,91 dari 30
	Disiplin	4,99 dari 5

4. Ujian Dinas Tingkat I

Bagian Sumber Daya Manusia telah melaksanakan kegiatan Pembekalan dan Ujian dinas Tingkat I yang merupakan salah satu instrumen penting untuk mengukur kompetensi, wawasa dan pemahaman regulasi kedinasan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Pelaksanaan ujian ini juga berfungsi sebagai penjamin mutu agar PNS yang akan naik pangkat memiliki kapasitas yang selaras dengan tanggung jawab baru yang akan diembannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui mekanisme kerjasama antara Bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Kementerian Perhubungan.

Tabel 3.3 Ujian Dinas Tingkat I

No	Ujian Dinas Tingkat I	Tanggal	Peserta	
			Lulus	Tidak Lulus
1.	ANGKATAN I	13 - 16 Oktober 2025	50	0
2.	ANGKATAN II	20 - 23 Oktober 2025	50	0
	JUMLAH		100	0

5. Pemberian Piagam Penghargaan Satya Lencana Karya Satya Penyusunan Program Kerja Dan Perencanaan Kegiatan Pada Bagian Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Pemilahan Piagam Dan Petikan Penghargaan Satyalancana Karya Satya XXX, XX Dan X Tahun 2025 Pada Unit Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4 Pemberian Piagam Penghargaan Satya Lencana Karya Satya Tahun 2025

Penghargaan	Usulan	Realisasi
X Tahun	811	711
XX Tahun	457	390



XXX Tahun	365	286
Jumlah	1633	1387

6. Pemeriksaan dan Penanganan Disiplin Pegawai
- a. Laporan Rekapitulasi Kasus/Pelanggaran Disiplin Tahun 2025

Tabel 3.5 Rekapitulasi Kasus/Pelanggaran Disiplin Tahun 2025

No.	Jenis Kasus	Laporan Masuk	DJPL	Biro	Final
1	Permohonan Izin/Keterangan Melakukan Perceraian	25	7	15	16
2	Tidak Masuk Kerja	13	7	4	10
3	Tindak Pidana Narkotika	2	-	2	2
4	Permohonan Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri	18	-	15	9
5	Hidup Bersama Tanpa Ikatan Pernikahan Yang Sah	-	-	-	-
6	Cerai Tanpa Izin	2	-	2	1
7	Tindak Pidana KDRT	1	1	-	-
8	Tindak Pidana Korupsi	3	2	1	3
9	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-
10	Tindak Pidana Umum	-	-	-	-
11	Pengaduan Masyarakat dan LHA Itjen	29	14	6	11
12	Kasus Disiplin lainnya	13	9	2	9
TOTAL		106			61

- b. Rekapitulasi Keputusan Hukuman Disiplin Tahun 2025

Tabel 3.6 Rekapitulasi Keputusan Hukuman Disiplin Tahun 2025

No	Jenis Hukuman	Jumlah
1	Teguran Lisan	-
2	Teguran Tertulis	-
3	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	-
4	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala	1
5	Penundaan Kenaikan Pangkat	-
6	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 Tahun	2
7	Penurunan Kelas Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 1 Tahun	7
8	Penurunan Kelas Jabatan Paling Rendah Selama 1 Tahun	1
9	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas	5



	Permintaan Sendiri	
10	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat	-
11	Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana	2
Total		18

c. Rekapitulasi Keputusan Pemberhentian Sementara Tahun 2025

Tabel 3.7 Rekapitulasi Keputusan Pemberhentian Sementara Tahun 2025

Jenis Keputusan	Jumlah
Pemberhentian Sementara	6

d. Rekapitulasi Keputusan Izin/Keterangan Melakukan Perceraian

Tabel 3.8 Rekapitulasi Keputusan Izin/Keterangan Melakukan Perceraian Tahun 2025

No.	Jenis Keputusan	Jumlah
1	Izin Melakukan Perceraian	10
2	Keterangan Melakukan Perceraian	3
3	Penolakan Pemberian Izin Melakukan Perceraian	1
Jumlah		14

7. Kegiatan Pra Assessment Pejabat Struktural dan Non Struktural Melalui Digital Profiling (DIPRO)

Bagian Sumber Daya Manusia telah melaksanakan kegiatan Pra Assessment Pejabat Struktural dan Non Struktural di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Melalui *Digital Profiling* dalam rangka untuk memetakan profiling pejabat Struktural dan Non Struktural, untuk mempersiapkan pengembangan karir, peningkatan soft skill dan mempermudah pelaksanaan mutasi, penetapan/pembagian klasifikasi, penempatan jabatan yang disusun berdasarkan hasil scoring penilaian Sumber Daya Manusia (SDM) menggunakan sistem penerapan *Digital Profiling* (DIPRO).

a. Kandidat

- 1) Kandidat Pra Assesment untuk Proyeksi Pejabat Administrator 40 Orang
- 2) Kandidat Pra Assesment untuk Proyeksi Pejabat Pengawas 184 Orang

b. Assessor

- 1) Assessor *Appraisal Essay* 30 Orang (Kasubdit dan Kabag di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut)
- 2) Assessor *Focus Group Discussion* 5 Orang (Bagian SDM Setditjen Hubla)
- 3) Assessor *Focus Group Discussion* 1 Orang dari Lembaga Profesional Psikolog



- c. Pelaksanaan
- 1) Notifikasi ke 224 Peserta
 - 2) Notifikasi ke 40 Peserta Proyeksi Pejabat Administrator dan 184 Proyeksi Pejabat Pengawas
 - 3) Peserta yang dinyatakan Lulus Administrasi kelengkapan dokumen dan upload dokumen pada waktu yang sudah di tentukan yaitu sebanyak 149 (35 Proyeksi Jabatan Administrator dan 114 Proyeksi Jabatan Pengawas)
 - 4) Peserta yang dinyatakan Tidak Lulus Administrasi kelengkapan dokumen dan upload dokumen pada waktu yang sudah di tentukan sesuai timeline yaitu sebanyak 75 (5 Proyeksi Jabatan Administrator dan 70 Proyeksi Jabatan Pengawas)
 - 5) Peserta yang mengikuti penilaian DIPRO sampai dengan Akhir Pelaksanaan :
35 Proyeksi Pejabat Administrator
114 Proyeksi Pejabat Pengawas
8. Kegiatan Pemetaan Potensi dan Kompetensi/Assessment
- Bagian Sumber Daya Manusia telah melaksanakan kegiatan Pemetaan Potensi dan Kompetensi/Assessment dalam rangka Promosi Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2025. Kegiatan Assessment Test dilaksanakan bersama dengan Biro Kepegawaian dan Organisasi bekerja sama dengan asesor dari *Assessment Center FISIP Universitas Padjajaran* dengan jumlah peserta sebanyak 46 (empat puluh enam) peserta bertempat di FISIP Universitas Padjajaran, Bandung, yaitu :

Tabel 3.9 Pemetaan Potensi dan Kompetensi/Assessment

No	Batch	Tanggal	Peserta	
			Proyeksi Eselon III	Proyeksi Eselon IV
1.	BATCH VII	13 November 2025	1	7
2.	BATCH VIII	14 November 2025	1	7
3.	BATCH XII	27 November 2025	10	10
4.	BATCH XIII	28 November 2025	-	10
	JUMLAH		12	34



BAB IV

KEGIATAN STRATEGIS / PERISTIWA PENTING / PROGRAM UNGGULAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

A. Reviu Penetapan Daftar Kode Simpul Transportasi Nasional

Dalam upaya meningkatkan efisiensi operasional pelabuhan dan menjamin kelancaran arus barang nasional seiring dengan perkembangan lingkungan strategis, Direktorat Kepelabuhanan melaksanakan kegiatan Penyempurnaan Penetapan Standarisasi Kodefikasi Pelabuhan. Langkah strategis ini bertujuan untuk mendapatkan standar penetapan Kode Pelabuhan yang dapat dipakai dalam kegiatan perdagangan maupun transportasi dalam dan luar negeri, memudahkan pengidentifikasian, dan mengintegrasikan kode pelabuhan di berbagai sistem dan instansi terkait, serta sebagai panduan bagi pengambil kebijakan dalam menetapkan kodefikasi di pelabuhan dan terminal.

Kegiatan ini mencakup reviu komprehensif terhadap Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP 487 DJPL 2021 Tentang Penetapan Kode Pelabuhan Laut dan Standarisasi Penetapan Kode Pelabuhan Laut, Terminal Umum, Terminal Khusus, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, Wilayah Tertentu di Perairan yang ditetapkan Sebagai Pelabuhan dan Wilayah Tertentu di Daratan yang Ditetapkan Sebagai Pelabuhan. Melalui serangkaian pengumpulan data, analisis mendalam, serta koordinasi intensif dengan para penyelenggara pelabuhan, Direktorat Kepelabuhanan berfokus pada penyusunan standar identifikasi yang seragam bagi pelabuhan, terminal umum, terminal khusus, maupun wilayah perairan tertentu.

Hingga akhir periode 2025, kegiatan ini telah mencapai tahap finalisasi dengan capaian sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan rapat pembahasan Petunjuk Teknis (Juknis) sebanyak tiga kali (Agustus, November, dan Desember 2025).
- b. Draft Akhir: Tersusunnya Draft Akhir Petunjuk Teknis dan Penetapan Daftar Kode Simpul Transportasi Laut pada tanggal 28 Desember 2025. Selanjutnya akan dilaksanakan Finalisasi Draft

B. Reviu Rencana Induk Pelabuhan Nasional

Berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015, bahwa Rencana Induk Pelabuhan Nasional disusun dalam rangka mewujudkan Tatanan Kepelabuhanan Nasional yang adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis serta mengakomodir kebutuhan dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, pengembangan pelabuhan dan penyusunan rencana induk pelabuhan.



Dalam pelaksanaan penyusunan Reviu RIPN dimaksud telah dilaksanakan pembahasan dan evaluasi dimana outputnya berupa penyampaian kepada Biro Hukum untuk Penerbitan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Reviu Rencana Induk Pelabuhan Nasional, antara lain :

- a. Surat Direktur Kepelabuhanan kepada Kepala Biro Hukum Nomor AL.301/1/11/DP-25 tanggal 6 Februari 2025 tentang Penyampaian Kembali Permohonan Penerbitan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Reviu Rencana Induk Pelabuhan Nasional.
- b. Surat Direktur Kepelabuhanan kepada Kepala Biro Hukum Nomor AL.301/3/15/DP-25 tanggal 15 Juli 2025 tentang Penyampaian Kembali Permohonan Penerbitan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Reviu Rencana Induk Pelabuhan Nasional.
- c. Surat Direktur Kepelabuhanan kepada Kepala Biro Hukum Nomor AL.301/6/2/DP-25 tanggal 15 September 2025 tentang Penyampaian Kembali Permohonan Penerbitan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Reviu Rencana Induk Pelabuhan Nasional

C. Penyusunan Prosedur dan/atau Bentuk Kontrak Pengadaan Barang Hasil Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Wanam

Dalam upaya mendukung implementasi Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional, telah dilaksanakan penyusunan Prosedur dan Bentuk Kontrak Barang Hasil Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Wanam. Proses ini mencakup kegiatan konsinyering bersama Kejaksaan Agung untuk pendalaman Legal Opinion (LO) atas aset yang sudah tersedia di Pelabuhan Wanam serta koordinasi intensif dengan pelaku usaha dalam rangka pendetailan fakta guna memperkuat landasan hukum LO tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- a. Konsinyering Tindak Lanjut Legal Opinion Barang Hasil Pekerjaan yang Sudah Tersedia di Pelabuhan Wanam (28 Oktober - 1 November 2025);
- b. Penyusunan Prosedur dan/atau Bentuk Kontrak Pengadaan Barang Hasil Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Wanam (13-15 November 2025);
- c. Reviu Kewajaran Harga Barang Hasil Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Wanam di KSPEAN Provinsi Papua Selatan (8-10 Desember 2025).

D. Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU)

KPBU merupakan kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang ditetapkan sebelumnya oleh Menteri yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antar pihak. KPBU sebagai alternatif strategi pembiayaan yang dapat diterapkan selain dari APBN untuk penyediaan infrastruktur.



Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam persaingan global. KPBU dilaksanakan dalam rangka penyediaan infrastruktur salah satunya adalah infrastruktur transportasi laut. Pelabuhan laut menjadi salah satu infrastruktur yang dapat dikerjasamakan antara pemerintah dengan badan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Seirama dengan hal itu, pemerintah melalui Bappenas menetapkan regulasi mengenai skema kerja sama antara sektor publik dan swasta. Berdasarkan Peraturan Menteri No. 4 Tahun 2015, tahapan pelaksanaan kerja sama tersebut dimulai dari fase perencanaan dan penyiapan, kemudian dilanjutkan ke tahap transaksi, hingga akhirnya masuk pada tahap manajemen pelaksanaan kesepakatan. Pada tahun 2025 Direktorat Kepelabuhanan melaksanakan pendampingan atas Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atas penyelenggaraan Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat dan Pelabuhan Anggrek Provinsi Gorontalo.

a. KPBU Pelabuhan Anggrek Provinsi Gorontalo

Gambar 4.1 Pelabuhan Anggrek Provinsi Gorontalo



Pelabuhan Anggrek terletak di Desa Ilangata, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Pelabuhan berada di pesisir pantai utara Pulau Sulawesi. Skema KPBU yang dijalankan adalah Desain, Bangun, Biaya, Operasi, dan Pemeliharaan (DBFOM) dengan masa konsesi 30 Tahun sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2051.

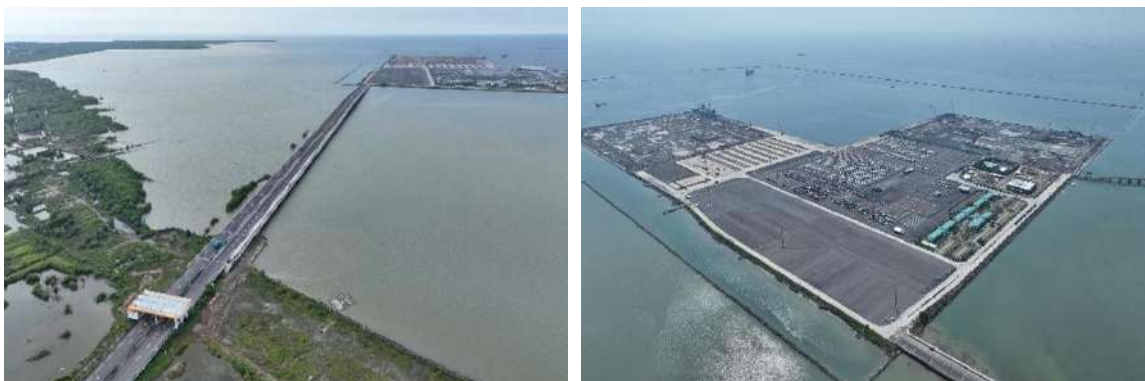


Lingkup KPBU :

- a. Penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat , Kapasitas 10.000 DWT;
- b. Penyediaan dan pelayanan air bersih dan bahan bakar;
- c. Penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas minimum kapasitas 128.000 TEU's;
- d. Penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
- e. Penyediaan dan pelayanan jasa terminal curah, kapasitas 50.000 ton;
- f. Penyediaan dan pelayanan jasa bongkar muat barang (cargo) minimum kapasitas 750.000 Tonnes;
- g. Penyediaan dan pelayanan jasa terkait kepelabuhanan lainnya;
- h. Penyediaan dan pelayanan lapangan penumpukan terminal reefer container minimum kapasitas 14.000 TEUs.

b. KPBU Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat

Gambar 4.2 Pelabuhan Patimban



Pelabuhan Patimban terletak di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pelabuhan Patimban merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dirancang untuk mendukung aktivitas logistik dan ekspor-impor di Indonesia, khususnya untuk industri otomotif.

Pelabuhan Patimban memiliki rencana kapasitas total sebesar 3.750.000 TEUs pada terminal peti kemas dan 600.000 CBU pada terminal kendaraan.

Rencana Kapasitas Tahap I-1 (2021 – akhir masa kerja sama) sebesar 250.000 TEUs pada terminal Peti Kemas dan 218.000 CBU pada terminal kendaraan. Kemudian dilanjutkan pada Tahap I-2 (2027 – akhir masa kerja sama) dengan rencana kapasitas sebesar 3.500.000 TEUs pada terminal peti kemas dan 382.000 CBU pada terminal kendaraan.



Skema KPBU yang dijalankan adalah Procure, Operate, Transfer dengan masa kerja sama 40 tahun terhitung sejak tanggal efektif perjanjian kerjasama mulai tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2061.

Lingkup Kerjasama

- a. Perencanaan dan penyediaan fasilitas suprastruktur Tahap I-1 dan Tahap I-2 sesuai kapasitas rencana;
- b. Pengoperasian dan pemeliharaan terminal peti kemas Tahap I-1 dan Tahap I-2;
- c. Pemeliharaan kolam putar dan kolam pelabuhan (maintenance dredging);
- d. Pengalihan kepemilikan Aset Proyek kepada PJPK pada akhir masa kerja sama.

E. Uji Petik Bidang Kelaiklautan Kapal

Sesuai dengan penerbitan pedoman standar keselamatan pelayaran transportasi laut yaitu:

- a. Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor IR-DJPL 1 Tahun 2025 tentang Uji Kelaiklautan Kapal Penumpang Angkutan Lebaran Tahun 2025;
- b. Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor IR-DJPL 4 Tahun 2025 tentang Uji Kelaiklautan Kapal Penumpang Angkutan Natal dan Tahun Baru 2026;
- c. Surat Edaran Direktur Perkapalan dan Kepelautan Nomor SE-DK 2 Tahun 2025 tentang Uji Kelaiklautan Kapal Transportasi Sungai, Danau, dan Penyebrangan (TSDP);
- d. Keputusan Direktur Perkapalan dan Kepelautan Nomor KP-DK 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Transportasi Laut pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2025;
- e. Keputusan Direktur Perkapalan dan Kepelautan Nomor KP-DK 11 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan Tahun 2025;
- f. Keputusan Direktur Perkapalan dan Kepelautan Nomor KP-DK 16 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Uji Kelaiklautan Kapal Penumpang Angkutan Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026.

Guna mewujudkan penyelenggaraan transportasi laut yang selamat, aman, dan terkoordinasi, telah dilaksanakan rangkaian uji petik angkutan laut di sejumlah lokasi untuk memastikan kelaiklautan kapal, khususnya bagi kapal penumpang selama menghadapi masa libur Lebaran 2025, Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 serta adanya Uji Kelaiklautan Kapal tambahan dikarenakan banyaknya kecelakaan kapal yang terjadi. Adapun lokasi pemeriksaan kapal tersebut di antaranya sebagai berikut:



Tabel 4.1 Daftar Lokasi Pelaksanaan Uji Petik Angkutan Lebaran 2025

No.	Lokasi	Tanggal	Jumlah Personil
1	Ternate	30 Januari s.d 1 Februari 2025	4 orang

Tabel 4.2 Daftar Lokasi Pelaksanaan Uji Petik Transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan Tahun 2025

No.	Lokasi	Tanggal	Jumlah Personil
1	Balikpapan	29 s.d 31 Juli 2025	4 orang
2	Labuan Lombok	30 Juli s.d 1 Agustus 2025	5 orang
3	Palembang	6 s.d 8 Agustus 2025	5 orang
4	Sibolga	30 Juli s.d 1 Agustus 2025	5 orang
5	Ambon	28 s.d 30 Juli 2025	4 orang
6	Kupang	6 s.d 8 Agustus 2025	4 orang
7	Kotabaru-Batulicin	5 s.d 7 Agustus 2025	4 orang
8	Merak	5 s.d 6 Agustus 2025	7 orang
9	Padang Bai	13 s.d 15 Agustus 2025	6 orang

Tabel 4.3 Daftar Lokasi Pelaksanaan Uji Petik Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026

No.	Lokasi	Tanggal	Jumlah Personil
1	Makassar	10 s.d 12 November 2025	5 Orang
2	Kupang	12 s.d 14 November 2025	5 Orang
3	Surabaya	11 s.d 13 November 2025	5 Orang
4	Tanjung Wangi	12 s.d 14 November 2025	5 orang
5	Ambon	11 s.d 14 November 2025	4 Orang
6	Bitung	12 s.d 14 November 2025	5 Orang
7	Kotabaru-Batulicin	20 s.d 22 November 2025	7 Orang
8	Muara Angke	24 November 2025	5 Orang
9	Merak	27 s.d 28 November 2025	5 Orang
10	Ternate	24 s.d 26 November 2025	5 Orang
11	Kendari	24 s.d 26 November 2025	5 Orang
12	Dumai	26 s.d 28 November 2025	5 Orang



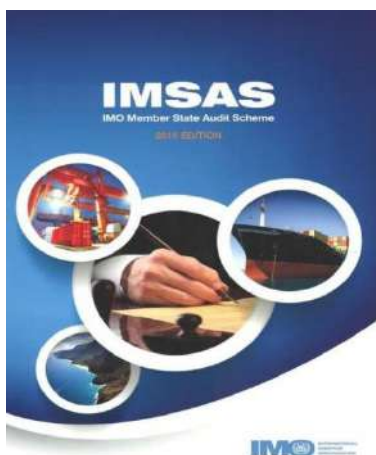
13	Merauke	26 s.d 28 November 2025	4 Orang
14	Sorong	27 s.d 29 November 2025	5 Orang
15	Batam	20 s.d 22 November 2025	5 Orang

F. **Audit IMO Member State Audit Scheme (IMSAS)**

IMO Member State Audit Scheme (IMSAS) adalah program yang diluncurkan oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO) untuk memastikan bahwa negara-negara anggotanya memenuhi kewajiban negara anggota dalam menjalankan konvensi-konvensi internasional yang dikeluarkan oleh IMO, terutama yang berkaitan dengan keselamatan maritim, perlindungan lingkungan, serta standar kerja di laut.

IMSAS dimulai pada tahun 2016 sebagai bagian dari komitmen IMO untuk memperkuat kepatuhan dan meningkatkan transparansi dalam penerapan peraturan maritim internasional. Sistem audit ini dimulai berdasarkan keputusan Assembly IMO ke-29 pada tahun 2015 yang mendukung penerapan mekanisme audit negara anggota. Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan STRATEGI MARITIM NASIONAL (Overall Strategy) untuk Implementasi Instrumen IMO yang meliputi:
 - a. Anggaran (Financial Support)
 - b. Tim Komite Koordinator / Task Force
 - c. Strategi Implementasi Instrumen IMO yang menyeluruh
 - d. Metode/prosedur penerapan/implementasi Amandemen Konvensi
 - e. Metode evaluasi kinerja dan pelaporannya
- 2) Melengkapi pelaporan kepada IMO melalui IMO GISIS;
- 3) Melengkapi Pre-Audit Questionnaire (PAQ) dan Additional Pre-Audit Information (APAI);
- 4) Melaksanakan Mock Audit.





G. Development and Improvement of Indonesian Aids to Navigation (ATON) Project

Kegiatan pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) dari Economic Development Co-operation Fund (EDCF) untuk meningkatkan kehandalan SBNP melalui program pembangunan dan replacement untuk 14 unit Menara Suar dan 90 unit Rambu Suar yang tersebar di 20 Distrik Navigasi.

Tabel 4.4 Daftar Pembangunan Menara Suar Dan Rambu Suar

No	Lokasi	Disnav	Keterangan
1	P. Jemur	Dumai	Light House
2	Tanjung Jabung	Palembang	Light House
3	Karang Taeli	Palembang	Light Beacon
4	Pel Muntok	Palembang	Light Beacon
5	Katima Bongkok	Palembang	Light Beacon
6	Pel Manggar	Palembang	Light Beacon
7	Montong Depan	Palembang	Light Beacon
8	Pel Sambas	Sibolga	Light Beacon
9	P. Pono	Sibolga	Light Beacon
10	P. Mansalar	Sibolga	Light Beacon
11	Sirandah	Teluk Bayur	Light Beacon
12	Muko-Muko	Teluk Bayur	Light Beacon
13	Cingkuak	Teluk Bayur	Light Beacon
14	Sibaru-baru	Teluk Bayur	Light Beacon
15	P. Semiun	Tanjung Pinang	Light Beacon
16	Tg Sauh	Tanjung Pinang	Light Beacon
17	Midai	Tanjung Pinang	Light Beacon
18	P. Serutu	Tanjung Priok	Light Beacon
19	Tg Patoh Binuangen	Tanjung Priok	Light Beacon
20	Tg Karawang	Tanjung Priok	Light Beacon
21	P. Nirwana	Tanjung Priok	Light Beacon
22	Tg Tanah	Tanjung Priok	Light Beacon
23	Karang Suji	Tanjung Priok	Light Beacon
24	Krg. Florence Adelaide	Tanjung Priok	Light Beacon
25	Beting Eka	Tanjung Priok	Light Beacon
26	Beting Raja	Tanjung Priok	Light Beacon
27	Tg Awang	Benoa	Light Beacon
28	Petagan	Benoa	Light Beacon
29	Badas	Benoa	Light Beacon
30	P. Manuk	Cilacap	Light Beacon
31	Ranca Buaya	Cilacap	Light Beacon
32	Cikakap	Cilacap	Light Beacon



33	Karang Gajah	Cilacap	Light Beacon
34	Pangandaran	Cilacap	Light Beacon
35	Leti	Kupang	Light House
36	Lawowolo	Kupang	Light Beacon
37	Tg Oesina	Kupang	Light Beacon
38	Waikelo	Kupang	Light Beacon
39	Baranusa	Kupang	Light Beacon
40	Tg Tuak	Kupang	Light Beacon
41	Tg Batu Putih	Kupang	Light Beacon
42	Tg Kurung	Kupang	Light Beacon
43	P. Karang Sarbete	Kupang	Light Beacon
44	P. Sabolan Kecil	Kupang	Light Beacon
45	Gs. Boni	Kupang	Light Beacon
46	Kr. Unjuran	Kupang	Light Beacon
47	Lampel Ndao	Kupang	Light Beacon
48	Mensu Mania	Kupang	Light House
49	P. Nyamuk	Semarang	Light House
50	Sepanjang	Surabaya	Light House
51	P. Kalambau	Banjarmasin	Light Beacon
52	Tanjung Matoa	Banjarmasin	Light Beacon
53	Pasige	Bitung	Light Beacon
54	Kawaluso	Bitung	Light Beacon
55	Latungan	Bitung	Light Beacon
56	Tg Mandano	Bitung	Light Beacon
57	Krg. Lingian	Bitung	Light Beacon
58	New Port Hijau	Makassar	Light Beacon
59	New Port Merah	Makassar	Light Beacon
60	P. Raja	Makassar	Light Beacon
61	Tg Bulu Bulu	Makassar	Light House
62	P. Macan	Pontianak	Light Beacon
63	Telok Air	Pontianak	Light Beacon
64	Gosong Mangkut	Pontianak	Light Beacon
65	Masa Tiga	Pontianak	Light Beacon
66	P. Lemukutan	Pontianak	Light Beacon
67	Anakaur	Pontianak	Light Beacon
68	Tg Tamarong	Samarinda	Light Beacon
69	Kr. Bengalon	Samarinda	Light Beacon
70	Ramtun Depan Tg Dewa	Samarinda	Light Beacon
71	Bakungan	Tarakan	Light Beacon
72	Bilangan-Bilangan	Tarakan	Light Beacon
73	Sangalaki	Tarakan	Light Beacon
74	Gosong Timur Bunyu	Tarakan	Light Beacon



75	Karang Tidur	Tarakan	Light Beacon
76	Ramsu Nunukan	Tarakan	Light Beacon
77	P. Fogi	Ambon	Light House
78	Pel Babang Putih	Ambon	Light Beacon
79	Pel Geser Hijau	Ambon	Light Beacon
80	Pel Geser Merah (1)	Ambon	Light Beacon
81	Pel Geser Merah (2)	Ambon	Light Beacon
82	Pel Amahai Merah	Ambon	Light Beacon
83	P. Pombo	Ambon	Light Beacon
84	P. Liki	Jayapura	Light Beacon
85	P. Vanildo	Jayapura	Light Beacon
86	Tg Rainbawi	Jayapura	Light Beacon
87	Tanjung Kelapa	Jayapura	Light Beacon
88	P. Yamma	Jayapura	Light Beacon
89	Sungai Membrano	Jayapura	Light Beacon
90	Miosbepondi	Jayapura	Light Beacon
91	P. Naufi	Jayapura	Light Beacon
92	P. Rani	Jayapura	Light Beacon
93	P. Kabuai	Jayapura	Light Beacon
94	P. Laag	Merauke	Light Beacon
95	Muara Atsy (R)	Merauke	Light Beacon
96	Muara Atsy (G)	Merauke	Light Beacon
97	Alur Pelabuhan Agats (G)	Merauke	Light Beacon
98	Alur Pelb Agats	Merauke	Light Beacon
99	Selat Safan/Muli	Merauke	Light Beacon
100	Muara SG Torasi	Merauke	Light Beacon
101	P. Augusta	Sorong	Light Beacon
102	MS. P Yefyus	Sorong	Light House
103	P. Fani	Sorong	Light Beacon
104	Kei Kecil	Tual	Light Beacon

H. Kegiatan Pembangunan Kapal Negara Patroli Rigid Hull Aluminium Boat (RHAB)

Kegiatan pembangunan kapal negara patroli berupa RHAB (Rigid Hull Aluminium Boat) merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam meningkatkan kapasitas dan kesiapan armada patroli di berbagai wilayah perairan Indonesia. Pengadaan kapal ini difokuskan untuk mendukung tugas operasional Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP), khususnya dalam hal pengawasan keselamatan pelayaran, penegakan hukum di laut, serta respon cepat terhadap kondisi darurat.



Kapal RHAB dikenal memiliki keunggulan dari sisi kecepatan, manuverabilitas, serta efisiensi operasional, sehingga sangat sesuai digunakan pada wilayah kerja pelabuhan maupun perairan dengan tingkat aktivitas tinggi. Dengan konstruksi berbahan aluminium yang kuat dan ringan, kapal ini diharapkan mampu beroperasi secara optimal dalam berbagai kondisi perairan.

Pembangunan kapal negara patroli ini juga menjadi bagian dari strategi pemerataan sarana operasional pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen Hubla, baik pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) maupun Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP). Penempatan kapal dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional di masing-masing wilayah kerja guna meningkatkan efektivitas pengawasan serta pelayanan keselamatan pelayaran.

Adapun rincian pembangunan kapal negara patroli RHAB Tahun 2025 yang telah dialokasikan ke berbagai UPT adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5 Pembangunan Kapal Negara Patroli Rigid Hull Aluminium Boat (RHAB)

No	Nomor Kapal	Kelas Kapal	Lokasi Penempatan	Tahun Pembuatan	Keterangan
1	RHAB 022	V	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tarakan	2025	Pembuatan Baru
2	RHAB 023	V	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Manado	2025	Pembuatan Baru
3	RHAB 024	V	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kuala Cinaku	2025	Pembuatan Baru
4	RHAB 025	V	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kalabahi	2025	Pembuatan Baru
5	RHAB 026	V	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Bajoe	2025	Pembuatan Baru
6	RHAB 027	V	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Serui	2025	Pembuatan Baru
7	RHAB 028	V	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Selor	2025	Pembuatan Baru
8	RHAB 029	V	Kantor Unit Penyelenggara	2025	Pembuatan Baru



			Pelabuhan Kelas III Belang-Belang		
9	RHAB 030	V	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kaimana	2025	Pembuatan Baru
10	RHAB 031	V	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Lapuko	2025	Pembuatan Baru
11	RHAB 032	V	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Lewoleba	2025	Pembuatan Baru
12	RHAB 033	V	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Marapokot	2025	Pembuatan Baru
13	RHAB 034	V	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Melonguane	2025	Pembuatan Baru
14	RHAB 035	V	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Saketa	2025	Pembuatan Baru
15	RHAB 036	V	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Susoh	2025	Pembuatan Baru
16	RHAB 037	V	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Waingapu	2025	Pembuatan Baru
17	RHAB 038	V	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Wini	2025	Pembuatan Baru

Gambar 4.3 Pembangunan Kapal Negara Patroli Rigid Hull Aluminium Boat





I. Bidang Kenavigasian

1. Menghadiri Pertemuan *The 32nd Aids to Navigation Fund (ANF) Committee*, Kegiatan ini dilaksanakan di Singapura pada tanggal 5-8 Mei 2025



2. Menghadiri kegiatan monitoring ANF Committee Meeting, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4-7 November 2025



J. Sidang/Pertemuan Multilateral, Regional dan Bilateral

Tabel 4.6 Penyelenggaraan Sidang/ Pertemuan Multilateral, Regional dan Bilateral pada Tahun 2025

No	Nama Sidang/ Pertemuan	Waktu/ Tempat	Jumlah Peserta/ Delegasi
1	<i>Workshop on International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code</i>	20 s.d. 21 Agustus 2025 secara daring	20 Peserta
2	<i>Port State Control (PSC) Mutual Inspection Training Course</i>	26 s.d. 27 Agustus 2025 secara daring	20 Peserta
3	<i>Workshop on Vessel Inspection according to the International Bulk Chemical (IBC) Code</i>	16 s.d. 17 September 2025 secara daring	20 peserta
4	<i>Workshop on Vessel Inspection according to the International Maritime Solid Bulk Cargo (IMSBC) Code</i>	23 September 2025 secara daring	18 peserta
5	<i>Refresher Training Course for VTS Operator IALA V-103/5</i>	10 s.d. 12 November 2025 di Singapura	5 peserta



Tabel 4.7 Pertemuan Indonesia- Brunei Darussalam-Malaysia –
Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)

No	Nama Sidang/ Pertemuan	Waktu/ Tempat
1	Pertemuan Indonesia- Brunei Darussalam-Malaysia – <i>Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)</i>	17 s.d. 21 Februari 2025 di Filipina
2	<i>Invitation to Attend the 48th ASEAN Maritime Transport Working Group (MTWG)</i>	7 s.d. 8 Mei 2025 di Brunei Darussalam
3	Pertemuan the 17 th Indonesia-Malaysia-Thailand <i>Growth Triangle (IMT-GT)</i>	6 s.d. 7 Agustus 2025 secara <i>hybrid</i> di Jakarta
4	<i>Cooperation Forum (CF) ke-16</i>	29 s.d. 30 September 2025 di Malaysia
5	<i>Invitation to Attend the 49th ASEAN Maritime Transport Working Group (MTWG)</i>	30 September – 1 October 2025 in Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam
6	<i>Tripartite Technical Expert Group (TTEG) ke-48</i>	1-2 Oktober 2025 di Malaysia
7	<i>Project Coordination Committee (PCC) ke-16</i>	3 Oktober 2025 di Malaysia
8	Menghadiri Pertemuan <i>10th DGST-MPA Officers Dialogue</i> dan <i>19th Meeting of DGST-MPA Training MoU</i>	9 s.d. 10 Desember 2025



Gambar 4.4 *10th DGST-MPA Officers Dialogue* dan *19th Meeting of DGST-MPA Training MoU*



Tabel 4.8 Sidang/Pertemuan pada *International Maritime Organization (IMO)*

No	Nama Sidang/ Pertemuan	Waktu/ Tempat	Formar
1	<i>Sub-Committee on Ship Design and Construction (SDC) – 11th session</i>	<i>London, 13 – 17 Januari 2025</i>	Online (Hybrid)
2	<i>Sub-Committee on Pollution Prevention and Response (PPR) – 12th session</i>	<i>London, 27-31 Januari 2025</i>	Online (Hybrid)
3	<i>Sub-Committee on Human Element, Training and Watchkeeping (HTW) – 11th session</i>	<i>London, 10-14 Februari 2025</i>	Online (Hybrid)
4	<i>Sub-Committee on Ship Systems and Equipment (SSE) – 11th session</i>	<i>London, 24-28 Februari 2025</i>	Online (Hybrid)
5	<i>Facilitation Committee (FAL) – 49th session</i>	<i>London, 10-14 Maret 2025</i>	Online (Hybrid)
6	<i>Legal Committee (LEG) – 112th session</i>	<i>London, 24 – 28 Maret 2025</i>	Online (Hybrid)
7	<i>Marine Environment Protection Committee (MEPC) – 83rd session</i>	<i>London, 7 – 11 April 2025</i>	Online (Hybrid)
8	<i>Sub-Committee on Navigation, Communications and Search and Rescue (NCSR) – 12th session</i>	<i>London, 13 – 22 Mei 2025</i>	Online (Hybrid)
9	<i>Technical Cooperation Committee (TC) – 75th session</i>	<i>London, 2 – 6 Juni 2025</i>	Online (Hybrid)
10	<i>Maritime Safety Committee (MSC) – 110th session</i>	<i>London, 18 – 27 Juni 2025</i>	Online (Hybrid)
11	<i>Council – 134th session</i>	<i>London, 7 – 11 Juli 2025</i>	2 Delegasi
12	<i>Sub-Committee on Implementation of IMO Instruments (III) – 11th session</i>	<i>London, 21 – 25 Juli 2025</i>	Online (Hybrid)
13	<i>Sub-Committee on Carriage of Cargoes and Containers (CCC) – 11th session</i>	<i>London, 8-12 September 2025</i>	Online (Hybrid)
14	<i>Marine Environment Protection Committee (MEPC/ES.2) – 2nd extraordinary session</i>	<i>London, 14 – 17 Oktober 2025</i>	3 Delegasi
15	<i>Council – 135th session</i>	<i>London, 19 – 21 November 2025</i>	5 Delegasi
16	<i>Assembly – 34th session</i>	<i>London, 24 November – 3 Desember 2025</i>	16 Delegasi
17	<i>Council – 136th session</i>	<i>London, 4 December 2025</i>	5 Delegasi



Gambar 4.5 Council – 134th session (London, 7 – 11 Juli 2025)



Gambar 4.6 Council – 135th session London (London, 19 – 21 November 2025)



Gambar 4.7 Assembly – 34th session dan Council – 136th session (London, 24 November – 4 Desember 2025)

Tabel 4.9 Kegiatan Dalam Rangka Pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan IMO Kategori “C” Periode 2026-2027

No	Nama Sidang/ Pertemuan	Waktu/ Tempat	Jumlah Undangan
1	Resepsi Diplomatik RI di London (Dilaksanakan di sela Sidang IMO Council ke-134)	London, 10 Juli 2025	Seluruh Negara Anggota IMO
2	Resepsi Diplomatik RI di Jakarta	Jakarta, 7 November 2025	60 Kedutaan Besar negara sahabat di Jakarta
3	Luncheon Penggalangan Dukungan di Jakarta	Jakarta, 17 November 2025	20 Kedutaan Besar negara sahabat di Jakarta
4	Resepsi Diplomatik RI di London (Dilaksanakan di sela Sidang IMO)	London, 25 November 2025	Seluruh Negara Anggota IMO



No	Nama Sidang/ Pertemuan	Waktu/ Tempat	Jumlah Undangan
	Assembly ke-34)		



Gambar 4.8 Resepsi Diplomatik RI di London
(Dilaksanakan di sela Sidang IMO Council ke-134) London, 10 Juli 2025



Gambar 4.9 Resepsi Diplomatik RI di Jakarta, 7 November 2025

K. Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB)

Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Deputi Bidang Meteorologi (BMKG), Deputi Bidang Operasi Pencarian Dan Pertolongan, Dan Kesiapsiagaan (Basarnas), Komandan Pusat Hidro-Oseanografi Tni Angkatan Laut (PUSHIDROSAL), dan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) tentang Strategi Maritim Nasional Penerapan Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara Bendera, Negara Pelabuhan dan Negara Pantai Sesuai Ketentuan Internasional.

Dokumen Strategi Maritim Nasional ini telah ditandatangani secara bersama pada tanggal 15 Mei 2025 di Jakarta. Tujuan adanya SKB ini sebagai tindak lanjut atas



salah satu temuan pada Mock Audit IMO Member State Audit Scheme (IMSAS) yang mana Indonesia belum memiliki dokumen strategi nasional yang mengatur koordinasi antar instansi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku Maritim Administrator Indonesia di IMO, termasuk mekanisme monitoring amendemen instrumen IMO.

L. Terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan IMO Kategori C Periode 2026-2027

Pemilihan dilaksanakan pada Sidang Majelis IMO ke-34 pada tanggal 24 November s.d. 3 Desember 2025. Sidang memilih 40 Negara anggota Dewan yang terbagi menjadi 3 kategori, yaitu 10 Negara Kategori A, 10 Negara Kategori B, dan 20 Negara di Kategori C. Indonesia berhasil terpilih kembali menjadi Anggota Dewan IMO kategori C periode 2026-2027 dengan perolehan 138 suara dan menduduki peringkat ke-5 dari 26 negara yang mencalonkan diri sebagai anggota Dewan IMO Kategori C periode 2026-2027. Dewan IMO memiliki hak untuk mengikuti Sidang Council IMO, yang bertugas melaksanakan fungsi organisasi selama masa Majelis IMO tidak bersidang seperti mengatur anggaran, *strategic direction*, dan *strategic plan*.

M. Kerjasama Dengan Negara-Negara Anggota IMO

Indonesia secara aktif mengembangkan berbagai kerja sama di sektor maritim dengan negara-negara anggota IMO. Berikut adalah rincian berbagai kerangka kerja sama Indonesia di bawah IMO pada tahun 2025 :

1. GEF-UNDP-IMO GloFouling Project

GEF-UNDP-IMO GloFouling Project merupakan kegiatan pertama yang diinisiasi oleh IMO dengan pendanaan dari Global Environment Facility (GEF) dan United Nations Development Programme (UNDP). Project ini bertujuan untuk meminimalkan perpindahan spesies akuatik melalui biofouling, atau untuk meminimalkan perkembangan kumpulan organisme akuatik pada bagian bawah lambung dan struktur kapal, yang semula akan berlangsung dari tahun 2018 s.d. 2022, diperpanjang 18 bulan sampai dengan tahun 2025.

Projek ini melibatkan dua WNI sebagai konsultan nasional, yaitu Prof. Ir. I Ketut Aria Pria Utama dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS Surabaya) dan Dr. Mochammad Riyanto dari Institut Pertanian Bogor (IPB Bogor). Keduanya juga telah terdaftar di E-Roster IMO serta memperoleh pendanaan dari Project dimaksud dalam melaksanakan tugas konsultansinya.

Pada tahun 2025, telah dilaksanakan Global Project Task Force Meeting of the GloFouling Partnerships ke-3 (GPTF-3), 10-13 Maret 2025, di Bali. GPTF-3 merupakan penanda sebagai akhir dari perjalanan Project yang telah berjalan selama hampir 7 (tujuh) tahun dan bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti, membina kemitraan baru, dan



memberikan laporan kemajuan yang komprehensif. Hasil-hasil ini akan berfungsi sebagai peta jalan untuk memandu inisiatif di masa depan dan menjaga keselarasan dengan misi menyeluruh Task Force. Adapun setelah penyelenggaraan GPTF-3 dimaksud, Ditjen Hubla juga menyelenggarakan Women in Maritime-Biofouling Management Workshop of the GEF-UNDP-IMO GloFouling Partnerships and TEST Biofouling Projects tanggal 13 Maret 2025 di Bali.

2. EU–ASEAN Sustainable Connectivity Package (SCOPE) Ship Safety Project
EU–ASEAN Sustainable Connectivity Package (SCOPE) Ship Safety Project adalah inisiatif kerja sama yang didanai oleh Uni Eropa dan diimplementasikan oleh IMO. Proyek ini dirancang untuk meningkatkan konektivitas transportasi dan kerja sama teknis antara Uni Eropa dan ASEAN serta di antara negara-negara anggota ASEAN, dengan fokus pada aspek keselamatan, penerapan solusi digital yang relevan, serta keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Tujuan khusus proyek ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas dalam bidang keselamatan kapal penumpang di sejumlah negara ASEAN yang menjadi sasaran, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand, serta di kawasan ASEAN secara lebih luas.

Pada tahun 2025, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan IMO, Interferry dan the World Maritime University (WMU) telah menyelenggarakan Regional Stakeholder Workshop to Enhance Domestic Ferry Safety pada tanggal 10 s.d. 11 Desember 2025 di Platinum Hotel Jimbaran Beach Bali, yang bertujuan untuk merumuskan strategi peningkatan keselamatan pada tiga negara penerima manfaat (Indonesia, Malaysia dan Thailand) yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara.

3. GloLitter Partnerships Project
GloLitter Partnerships merupakan proyek antara IMO, Food and Agriculture Organization (FAO), bersama dengan Pemerintah Norwegia, yang bertujuan untuk membantu negara-negara berkembang dalam mencegah dan mengurangi sampah di laut, khususnya sampah plastik. Proyek ini mendapat pendanaan dari Pemerintah Norwegia dan multi-donor. Terdapat sepuluh negara yang terpilih sebagai Lead Partner Countries (LPCs), termasuk di antaranya Indonesia, dan dua puluh negara lainnya berperan sebagai Partner Countries (PCs). Saat ini Ditjen Hubla melalui Direktur Perkapalan dan Kepelautan bertindak sebagai National Focal Point (NFP) dan Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bertindak sebagai Alternate National Focal Point pada proyek ini.



4. GreenVoyage2050

Proyek global ini bekerja sama dengan sejumlah negara berkembang terpilih di berbagai kawasan dunia, termasuk Small Island Developing States (SIDs) dan Least Developed Countries (LDCs), serta bermitra dengan berbagai asosiasi internasional di bidang maritim, organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lainnya, dan pelaku industri. Melalui kerja sama tersebut, proyek ini mendukung upaya pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor pelayaran, sejalan dengan tingkat ambisi yang ditetapkan dalam Strategi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca IMO.

Proyek ini di danai oleh pemerintah dari 6 negara donor meliputi Denmark, Finland, Prancis, Jerman, Belanda dan Norwegia. Negara anggota Greenvoyage2050 terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok negara fase 1 dan kelompok negara fase 2, Indonesia masuk ke dalam kelompok fase 2 yang mana proyek akan dilaksanakan pada antara tahun 2024-2030 bersama 11 negara lainnya.

Indonesia mendapatkan proyek pengembangan kapal Ferry Hidrogen hasil kerjasama antara PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan PT HDF Energy Indonesia.



BAB V

KETERLIBATAN STAKEHOLDER (CSR)

A. Bimbingan Teknis Keselamatan Pelayaran

Telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Keselamatan Pelayaran yang dilaksanakan ke dalam 2 (dua) gelombang. Anggaran yang diperlukan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp1.276.944,- dengan persentase pagu 99,99%. Adanya kegiatan ini diharapkan dapat mengingatkan para operator kapal, petugas pelabuhan, serta pengguna jasa transportasi laut untuk meningkatkan kesadaran terkait keamanan dan keselamatan pelayaran dan menerapkan prosedur keselamatan pelayaran. Kegiatan terbagi sesuai dengan metode sebagai berikut:

a. Gelombang I

Merupakan kegiatan Bimbingan Teknis Keselamatan Pelayaran di Ternate yang dilaksanakan pada tanggal 28 s.d 30 April 2025 bertempat di Gedung Dhuafa Center Ternate. Peserta kegiatan berjumlah 353 (tiga ratus lima puluh tiga) orang yang merupakan perwakilan dari Pejabat/Pegawai UPT Ditjen Hubla, Dinas Perhubungan Kota dan Kabupaten, Perusahaan Pelayaran dan Stakeholder terkait.



b. Gelombang II

Merupakan kegiatan Bimbingan Teknis Keselamatan Pelayaran di Banjarmasin yang dilaksanakan pada tanggal 25 s.d 26 September 2025 bertempat di Gedung Chandra, Banjarmasin. Peserta kegiatan berjumlah 390 (tiga ratus sembilan puluh) orang yang merupakan perwakilan dari Pejabat/Pegawai UPT Ditjen Hubla, Dinas Perhubungan Kota dan Kabupaten, Perusahaan Pelayaran dan Stakeholder terkait.





B. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kembali memperpanjang kewenangan survei dan sertifikasi statutoria terhadap kapal-kapal berbendera kepada PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Persero.

Perpanjangan pendelegasian kewenangan ditandai dengan dilakukannya Penandatanganan Perjanjian kerja sama antara Direktur Jenderal Perhubungan Laut yaitu Bapak Arif Toha dengan Direktur Utama PT. BKI yaitu Bapak Arisudono terkait kewenangan survei dan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia pada tanggal 11 Juli 2023 bertempat di Ruang Sriwijaya, Kantor Pusat Kementerian Perhubungan.

Perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT. BKI sudah berjalan sejak tahun 2017 dan dilakukan perpanjangan setiap tahun hingga saat ini. Dengan adanya pendelegasian kewenangan, maka PT. BKI berhak untuk melakukan survei dan audit pada aspek keselamatan kapal dan menerbitkan sertifikat statutoria kepada kapal-kapal berbendera Indonesia khususnya yang melakukan pelayaran internasional atas nama pemerintah.

Perjanjian kerja sama ini berupa pendelegasian kewenangan statutoria terhadap kapal berbendera Indonesia kepada PT. BKI berdasarkan ketentuan dari Koda Internasional yaitu RO Code (Code for Recognized Organization) berdasarkan Resolusi MSC 349 yang telah diberlakukan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.008/72/7/DJPL-15 tentang Pemberlakuan Koda Internasional untuk Organisasi yang diakui (Code for Recognized Organization / RO Code). Tujuan utama dilaksanakannya perjanjian kerja sama adalah untuk peningkatan pemenuhan bagi kapal-kapal berbendera Indonesia terhadap ketentuan konvensi internasional.

C. Workshop II Penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) Penyelenggaraan SBNP di Indonesia

1. Kegiatan Workshop penyusunan SOP Penyelenggaraan SBNP di Indonesia dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 21 Februari 2025 di Hotel Mercure Cikini Jakarta Pusat, bertujuan untuk menyusun draft kedua SOP penyelenggaraan SBNP di Indonesia





2. Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Alur Pelayaran dan Rambu Sungai dan Danau di Indonesia
FGD penyusunan SOP penyelenggaraan Alur-Pelayaran dan Rambu Sungai dan Danau di Indonesia dilaksanakan pada tanggal 22 s.d. 23 Desember 2025 di Hotel Mercure Cikini, Jakarta. Tujuan kegiatan ini Adalah dalam rangka Menyusun draft awal peraturan yang dapat digunakan dalam Penyelenggaraan Alur-Pelayaran Sungai dan Danau



D. Pertemuan/Rapat Terkait SBNP (Delimitasi Dan Rapat Antar Kementerian / Lembaga)

Telah dilaksanakan kegiatan untuk mengikuti pertemuan/rapat terkait SBNP (delimitasi Dan rapat Antar Kementerian/Lembaga) dengan uraian sebagai berikut:

No	Lokasi	Tanggal	Perihal
1	Melalui media <i>zoom meeting</i>	14 Januari 2025	Menghadiri Rapat BNPP perihal Isu Pembangunan Pagar Mensu Disnav Pontianak-Di Wilayah Perbatasan Malaysia
2	Hotel Grand Melia, Jakarta	6 s.d 7 Maret 2025	Menghadiri Rapat Kemenlu perihal Rapat Koordinasi Persiapan Pertemuan Pembahasan Implementing Arrangement (IA) Area Tumpang Tindih Yurisdiksi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen (LK) RI-Viet Nam



3	Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta	17 April 2025	Menghadiri Rakor Kemenlu perihal Persiapan Pertemuan Teknis Penetapan Batas Maritim RI dengan Timor-Leste
4	Jakarta	8 Agustus 2026	Menghadiri Rapat BNPP perihal Finalisasi Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025-2029 Lingkup Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut Dan Udara
5	Aone Hotel Jakarta	29 Agustus 2025	Menghadiri Rapat BNPP perihal Konsolidasi Dan Penyelarasan Data Finalisasi Rencana Aksi Bidang Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut Dan Udara Tahun 2026 (T-1) Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut Dan Udara Pada Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) Dan Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP)
6	Hotel Hyat Park Jakarta	16 Oktober 2025	Menghadiri Rapat Koordinasi Penetapan Batas Maritim (PBM) RI Terkait Evaluasi Dan Persiapan Perundingan PBM Dengan Republik Demotarik Timor Leste
7	Hotel Salak Bogor	5-7 November 2025	Menghadiri Rapat dan Sebagai Narasumber Koordinasi Pra Teknis Perundingan Batas Maritim (PBM) RI-RDTL



8	Orchardz Industri Hotel Jakarta	10 November 2025	Menghadiri Rapat BNPP perihal Finalisasi Rancangan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan tahun 2025-2029 Lingkup Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Lintas Batas Negara
9	Kantor Kementerian Luar Negeri RI , Jakarta	27 November 2025	Menghadiri Undangan KEMENLU Perihal Simposium Nasional "UNCLOS di Abad ke-21" Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
10	The Phoenix Hotel Yogyakarta	7-11 Desember 2025	Menghadiri Rapat KEMENLU-Perihal Pertemuan Teknis Ke-2 Penetapan Batas Maritim Antara RI dan RDTL



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT



@djplkemenhub151



maritimhub.kemenhub.go.id



@ditjenperhubunganlaut